

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BANK NEGARA
INDONESAI DALAM PELAKSANAAN STUDENT SMART CARD DI
KOTA MAKASSAR**

MUH. FAJAR AR

NOMOR STAMBUK : 10561 0469 113



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN BANK NEGARA
INDONESIA DALAM PELAKSANAAN *STUDENT SMART CARD* DI
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

Muhammad Fajar AR

Nomor Stambuk : 10561 04691 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

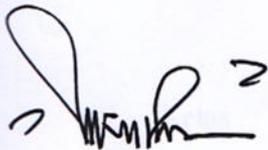
2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Bank Negara dalam Pelaksanaan *Student Smart Card* di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Muhammad Fajar AR
Nomor Stambuk : 10561 04691 13
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

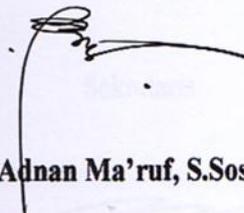
Menyetujui :

Pembimbing I



Dra. Hj. Musliha Karim, M.si

Pembimbing II



Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.si

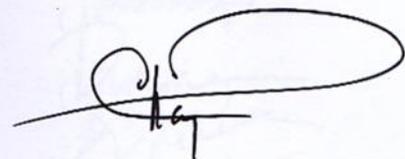
Mengetahui

Dekan Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Idris Malik, S.Sos., M.si

Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fisipol
Unismuh Makassar



Nasrulhaq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari selasa 21 agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.si (Ketua)
2. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.si
3. Drs. Ruskin Azikin, MM
4. Dra. Hj. Musliha Karim, M.si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajar AR

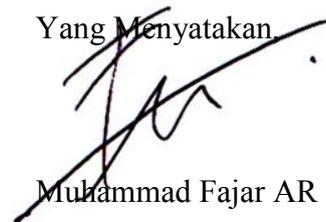
Nomor Stambuk : 10561 04691 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 9 April 2018

Yang Menyatakan



Muhammad Fajar AR

ABSTRAK

Muhammad Fajar AR,2018. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Bank Negara Indonesia Dalam Pelaksanaan *Student Smart Card* Di Kota Makassar (dibimbing oleh Musliha Karim dan Adnan Ma'ruf).

Student Smart Card adalah kartu layanan yang diperuntukkan untuk pelajar di kota Makassar yang berfungsi sebagai kartu identitas siswa, sebagai alat untuk melihat kehadiran siswa. Selain itu, juga berfungsi sebagai *e-money* atau uang elektronik yang dapat diisi maksimal sampai satu juta rupiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *Student Smart Card* di kota Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai data yang dikumpul dari lapangan secara objektif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang.

Hasil penelitian kerjasama pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card* di kota Makassar sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan (a). Komitmen pada kerjasama dimana pemerintah memberikan *Student Smart Card* kepada seluruh pelajar di SMPN 6 Makassar namun juga disisi lain tetap memberikan kebebasan kepada pelajar apakah ingin menggunakannya atau tidak, (b). Kejelasan dimana kejelasan waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan *Student Smart Card* antara satu minggu sampai dengan dua minggu namun karena pembuatannya dalam jumlah yang banyak maka jadinya bertahap, (c). Kepemimpinan yang kuat sudah berjalan dengan baik. Baik dari pengendalian maupun pengawasan yang dilakukan. Pengendalian seperti memberikan arahan kepada pihak sekolah tentang edukasi fungsi dan manfaat *Student Smart Card*. Dari pengawasan seperti riwayat transaksi pelajar bisa diketahui ini juga membuat pelajar bisa lebih hemat dan belanja seperlunya saja, (d). Perencanaan yang jelas dalam pelaksanaan *Student Smart Card* seperti untuk mendisiplinkan pelajar dalam hal penggunaan uang disisi lain juga untuk mengkampanyekan untuk lebih sering menggunakan uang non tunai, dan (e) Komunikasi yang baik dalam pelaksanaan *Student Smart Card* seperti adanya pertukaran informasi antara pelajar dan pihak sekolah.

Kata Kunci : *Student, Smart, Card, Student Smart Card*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Bank Negara Indonesia Dalam Pelaksanaan *Student Smart Card* Di Kota Makassar**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si yang juga selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dra. Hj. Musliha Karim, M.si selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis.
5. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
6. Bapak Munir, S. Ag, M.Ag selaku kepala sekolah SMP Negeri 6 Makassar dan seluruh guru,staff,ataupun pegawai yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini
7. Bapak Mursyid yang senantiasa melayani serta menyediakan data yang dibutuhkan.
8. Teman-teman di CV. Eben Makmur Abadi Ibu Ervina,Ibu Rahma,Risal,Rasak,dan Kebba yang telah memberi kebijaksanaan serta motivasi selama ini kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyusun tugas akhir.
9. Sahabat-sahabat dekat rumah Andi Darma,Ahmad Risal Bakri,Asriadi,Akbar Jide,Akbar Eko Saputra,Ian Hernanda,Muhammad Fahmi Al-Barqah,Budi RM,Alif Anugrah,yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat.
10. Teman-teman kelas Non Reguler jurusan Ilmu Administrasi Negara Ulfi Tantri Wahid, Ridwan Labbang, Syawal Fitriah, Nurdiana Nurdin,Agus Salim dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang selama kuliah.
11. Teman-teman kelas reguler jurusan ilmu administrasi Negara Patta Ne'nang,Akbar Mappiselle,Diani Safitri,Awaluddin,Zainuddin,Syarifah

Hasniati dan yang lain yang telah sama-sama berjuang dari semester satu sampai semester 5

12. Teman-teman KKP Angkatan XIII Asfar,Arwin,Nuremi,Selmi,dan Sukma

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 9 April 2018



Muhammad Fajar AR

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kerjasama	8
B. Bentuk-Bentuk Kerjasama	11
C. Konsep Pelaksanaan.....	16
D. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan	18
E. Konsep Pendidikan	20
F. Konsep <i>Smart Card</i>	21
G. Kerangka Pikir	22
H. Fokus Penelitian	23
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27

F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian Profil Kota Makassar.....	33
1. Visi dan Misi.....	34
2. Kondisi strategis Kota Makassar.....	34
B. Deskripsi Objek Penelitian SMP Negeri 6 Makassar	36
1. Sejarah Singkat SMP Negeri 6 Makassar	36
2. Visi dan Misi.....	38
3. Tujuan Sekolah	38
4. Data Siswa,Guru,Staf,Dan Karyawan	40
C. Pembahasan Hasil Penelitian	41

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 Data Informan Penelitian	27
B. Tabel 3 Data Siswa SMP Negeri 6 Makassar	40
C. Tabel 4 Data Guru, staf, dan Pegawai SMPN 6 Makassar.....	40

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1 Kerangka Pikir.....	23
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Slogan pemerintah kota Makassar yang mengatakan “Makassar dua kali tambah baik” bukan hanya sebatas kata-kata saja ini dibuktikan dari program-program di kota Makassar yang bersifat inovatif dan berbasis teknologi salah satunya ialah *Student Smart Card*.

Student Smart Card merupakan kartu layanan pelajar kota Makassar dimana *Student Smart Card* dapat berfungsi sebagai kartu identitas pelajar, sebagai alat pembayaran non tunai untuk keperluan proses belajar-mengajar pelajar, sebagai alat untuk mengawasi pelajar di sekolah, serta untuk mengontrol belanja pelajar/anak di sekolah.

Fungsi *Student Smart Card* bersifat umum dimana ini menjadi bagian dari proses belajar-mengajar pelajar kota Makassar maka dari itu dalam pelaksanaannya pemerintah kota Makassar bekerjasama dengan pihak Bank Negara Indonesia. Kerjasama adalah kesepakatan antar organisasi, kelompok, maupun individu dalam membagi, melaksanakan, serta menanggung untung dan rugi. Meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan jika diperlukan Notoadmodjo (2003). Kerjasama juga dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan bersama yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip maupun rumusan-rumusan kerjasama demi percepatan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan diperlukan adanya kemampuan untuk

bekerjasama dalam pelaksanaan *Student Smart Card*. *Student Smart Card* dapat dikatakan berhasil diterapkan jika adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dimana setiap tugas masing-masing antara Pemerintah Kota Makassar dan Bank Negara Indonesia sangat menentukan bagi pencapaian hasil program yang telah ditentukan sebelumnya selain itu tingkat pencapaian dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dapat dikatakan berhasil apabila *Student Smart Card* dapat digunakan secara luas dan dapat bermanfaat bagi pelajar kota Makassar. Untuk itu faktor kerjasama sangat mempengaruhi kepada sukses tidaknya pelaksanaan *Student Smart Card* yang diterapkan di kota Makassar.

Keberadaan pemerintah daerah di mana pun juga adalah dimaksudkan untuk menempatkan pembangunan pendidikan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan, Dalam konteks ini *Student Smart Card* merupakan bagian dari upaya pembangunan pendidikan yang bersifat inovatif dan berbasis teknologi yang dilakukan pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia yang bertindak sebagai mitra. Kota Makassar merupakan barometer untuk kemajuan di daerah Indonesia Timur sudah sepatutnya memberikan warna baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kota Makassar itu sendiri dan menjadi contoh untuk kemajuan daerah-daerah lain di Indonesia Timur ini.

Peningkatan kualitas pendidikan melalui standarisasi dan profesionalisme yang sedang berlangsung pada hari ini menuntut pemahaman semua pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dari sentralisasi menuju desentralisasi telah

menekankan bahwa pengambilan keputusan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian, hak menyelenggarakan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah berada dalam tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten, sehingga pelaksanaannya akan diwarnai oleh *political will* pemerintah daerah, yang ditandai dalam peraturan daerah (perda).

Perkembangan teknologi juga disisi lain memberikan pengaruh signifikan terhadap kerjasama dalam pelayanan publik ini terlihat dari program pemerintah kota Makassar yang mengusung *Student Smart Card* sebagai upaya pemerintah kota Makassar untuk menjadikan Makassar lebih baik lagi. Penggunaan teknologi *Student Smart Card* sebagai kartu yang dapat digunakan untuk kartu layanan untuk pelajar, *one card for all*. Kartu ini juga sebagai dukungan terhadap program Bank Indonesia, yaitu *Less Cash Society* yang lebih efisien dalam bertransaksi dibandingkan alat transaksi tunai.

Student Smart Card sebagai sebuah hal baru di dalam dunia pendidikan di Kota Makassar bukan hanya untuk memudahkan pelajar untuk bertransaksi namun disisi lain juga untuk memudahkan proses belajar mengajar seperti dapat meminjam buku di perpustakaan dan melihat kehadiran pelajar di sekolah. *Student Smart Card* juga diharapkan mampu mengubah paradigma lama pelajar kota Makassar ke paradigma yang baru dimana paradigma baru ini pelajar diajak untuk lebih banyak menggunakan uang non tunai atau *Student Smart Card*. Dengan penggunaan *student smart card* ini tentu akan memudahkan pelajar kota Makassar dalam melakukan transaksi apapun juga selain itu penggunaan *student smart card*

ini memungkinkan untuk pelajar tidak repot lagi memegang uang fisik terlalu banyak.

Student Smart Card sering disebut sebagai *chip card* atau *integrated circuit* (IC). Definisi *chip card* sendiri yaitu kategori umum yang mencakup *student smart card* dan *memory card*. *Student Smart card* adalah *plastic card* yang mengandung *memory chip* dan *microprocessor*. Kartu ini bisa menambah, menghapus, mengubah informasi yang terkandung. Keunggulan *student smart card* tidak perlu mengakses database di server karena sudah ada sebagian di kartu. Sedangkan *memory card* dipasangi *memory silicon* tanpa *microprocessor*. Fungsi dasar suatu *student smart card* adalah untuk mengidentifikasi *card holder* ke sistem komputer. *Card holder* disini adalah pemilik asli kartu tersebut. Identifikasi ini menyangkut otentifikasi organisasi yang membuat kartu tersebut dan *card holder* serta hak aksesnya. Dwi Apriyani (2008). Bank Negara Indonesia wilayah kota Makassar akan menyediakan *Student Smart Card* di kota Makassar yang jumlahnya mencapai 312.000 anak. Mereka tersebar di 365 SD negeri dan inpres, 39 SMP, 22 SMA, dan 9 SMK.

Transaksi adalah bagian dari kehidupan manusia yang paling esensial. Ia muncul hampir seumur peradaban manusia itu sendiri. Namun yang membedakan manusia sangat unik sebagai makhluk ekonomi adalah, manusia mampu menjadikan dirinya sebagai subyek sekaligus obyek dari transaksi pada saat bersamaan. Itulah sebabnya, proses perbaikan sistem transaksi selalu beriringan dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupannya. Berbekal prinsip itu, maka bisa dipahami mengapa negara melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

memandang perlu untuk memasyarakatkan program *Less Cash Society* atau masyarakat yang gemar bertransaksi non-tunai atau bertransaksi dengan uang berfisik. Langkah yang sangat bagus dilakukan oleh Pemerintah kota Makassar bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia dengan melaunching *Student Smart Card*. *Student Smart Card* yang merupakan kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan BNI, menggabungkan dua fungsi utama yakni sebagai basis data (*data base*) dan alat transaksi. Basis data itu mencakup kartu identitas pelajar, sebagai kartu yang dapat digunakan dalam melihat presentase kehadiran, dan sebagai kartu yang dapat digunakan untuk meminjam buku di perpustakaan. Sedangkan pada fungsi pembayaran mencakup fungsi sebagai pembayaran non tunai dan pembayaran toll. Secara umum indikator yang dapat dilihat dari sebuah kerjasama terdiri dari :

1. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik,
2. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama,
3. dan Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan lebih kuat dan berkualitas. pengertian kerja sama yang dinyatakan Davis dalam Dewi (2006).

Faktor penentu keberhasilan sistem pelayanan publik, terutama bila disadari bahwa sebagian besar dari permasalahan dan keluhan mengenai pelayanan publik di Indonesia dapat dikembalikan pada unsur manusia pengemban fungsi pelayanan publiknya. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang ke

masyarakat, setiap hari mulai terjadi yang namanya urbanisasi yang juga semakin tidak bisa dicegah maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut harus menggunakan teknologi.

Masalah yang timbul adalah ketika kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar sebagai penyedia pelayanan *Student Smart Card*. Hal ini yang membuat program *Student Smart Card* kurang begitu dikenal secara luas juga belum terlalu dapat dirasakan manfaatnya oleh pelajar Kota Makassar. Maka dari itu penulis tertarik untuk memilih judul “Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam Pelaksanaan *Student Smart Card* di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *Student smart card* di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Student Smart Card* di kota Makassar.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya tentang kerjasama pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card* di Kota Makassar
- b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kerjasama pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card* di Kota Makassar

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam kegunaan maupun manfaat *Student Smart Card*.
- b. Bagi Pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan kerjasama pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card*.
- c. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

Kerjasama adalah kebersamaan,kepedulian,dan jaringan kerja yang memunculkan manfaat timbal balik antar pihak yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan Adisasmita (2010). Kerjasama pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau dari berbagai pihak baik,secara individual maupun secara kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003) Kerjasama adalah formal atau kelompok-kelompok,individu-individu,atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.Berbagai pengertian kerjasama menurut Promkes Depkes RI Ditjen P2L &PM (2004) Meliputi :

- 1.Kerjasama memiliki pengertian adanya komunikasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner”
- 2.Kerjasama adalah proses mengupayakan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama
- 3.Kerjasama adalah bentuk mengikutsertakan berbagai komponen baik sektor masyarakat,kelompok,atau pun lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas prinsip,kesepakatan,dan peran masing-masing.

Kerjasama dapat ditandai dengan adanya pembagian resiko untung atau rugi,pembagian tugas,pembagian tanggung jawab,pembagian investasi,dan lain-lain. Dalam perspektif pelayanan publik,kerjasama merupakan upaya yang

dilakukan oleh pemerintah kota dengan pihak lain dalam usaha percepatan pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Bournemouth (2006) juga mengemukakan bahwa kerjasama adalah jalan keluar yang tepat untuk memecahkan masalah pelaksanaan pada kebijakan yang dianggap sulit untuk dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Karakteristik kerjasama menurut Bournemouth (2006) antara lain:

1. Kejelasan dan objektivitas
2. Komitmen pada kerjasama
3. Kejelasan pada peran dan tanggung jawab
4. Adanya keseimbangan peran diantara anggota yang ikut dalam kemitraan
5. Adanya level kepercayaan yang tinggi pada masing-masing anggota
6. Kepemimpinan yang kuat
7. Perencanaan yang jelas (*clear plan*)
8. Komunikasi yang baik
9. Identifikasi sumber daya yang baik

Terdapat prinsip yang perlu dipahami dalam membangun suatu kerjasama oleh masing-masing anggota kerjasama Notoatmodjo (2003) yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan adalah organisasi, institusi, atau individu yang telah siap melakukan kerjasama harus merasa sama atau sejajar posisinya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.
2. Prinsip Keterbukaan adalah Keterbukaan terhadap kelemahan ataupun kekurangan masing-masing anggota atau sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dibentuknya

kerjasama sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi, saling membantu diantara golongan (mitra).

3. Prinsip Asas manfaat bersama (*mutual benefita*) adalah organisasi, instansi, atau individu yang telah menjalin kerjasama memperoleh manfaat dari kerjasama yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Model-model kerjasama menurut Sulistiayani (2014) berikut ini :

1. *Pseudo partnertship*, atau kerjasama semu
2. *Mutualism Partnertshi*, atau kerjasama mutualistik
3. *Conjugation partnertship*, atau kerjasama melalui peleburan dan pengembangan

Kerjasama semu adalah sebuah kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang atau dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilaksanakan serta disepakati. Dalam kerjasama semacam ini, kedua belah pihak atau lebih masing-masing merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang lain yang bekerjasama belum tentu memahami apa yang diperjuangkan dan dampaknya seperti apa. Kerjasama semu semacam ini tampak nyata terjadi pada penanganan teror bom di Surabaya, yang disosialisasikan melalui slogan “Kami tidak takut”. Rakyat yang berposisi sebagai rekan kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui makna atas semua ini, walaupun mereka yakin bahwa ini sangat penting sebagai wujud dukungan rakyat atas pemerintah itu sendiri.

Kerjasama mutualistik adalah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kerjasama, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya kerjasama, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjukkan satu dengan yang lain.

Kerjasama konjugasi adalah kerjasama yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*" dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri. Berangkat dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok, atau perorangan yang memiliki kelemahan dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kerjasama dengan model ini. Dua pihak dapat melakukan kunjungan dalam rangka mengingatkan kemampuan masing-masing.

B. Bentuk-bentuk kerjasama

Bentuk kerjasama sedikit banyak dipengaruhi oleh teori perkembangan ilmu administrasi. Dalam teori humanistik menjelaskan bahwa kerjasama dalam organisasi sebaiknya memiliki peran yang fleksibel, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang partisipatif, dan keputusan yang bersifat teori Mansyur Ahmad (2010).

Teori modern dalam perkembangan administrasi juga mempengaruhi bentuk kerjasama dimana pada pilihan publik, fokus pada politik dan locusnya ada pada pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang atau jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi kompleks. Paradigma ilmu administrasi publik yang dicetuskan oleh G. Fredrickson (1997) tentang administrasi negara baru yang menjelaskan fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambar, mendesain, atau membuat organisasi dapat berjalan dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsive dan mengundang partisipasi, serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan Mansyur Ahmad (2010).

Pengembangan kerjasama antara Pemerintah daerah, badan usaha milik daerah atau negara, swasta dan masyarakat pada dasarnya erat kaitannya dengan domain administrasi publik melalui reformasi administrasi negara. Reformasi administrasi negara di sektor pemerintahan bermuara pada “*good governance*” sedangkan pada sektor swasta (perusahaan) adalah bermuara pada “*good corporate governance*”. Perubahan paradigma administrasi publik yang merupakan salah satu pendorong tumbuh dan berkembangnya konsep dan model kerjasama strategis antara Pemerintah daerah, badan usaha milik daerah atau negara, swasta dan masyarakat telah diilhami oleh beberapa pemikiran yang antara lain adalah David Osborne dan Peter Plastrik dalam “*Banishing Bureaucracy*” yang pada intinya adalah mewirauahakan birokrasi melalui 5 strategi dan David Osborne dan Ted Gaebler dalam “*Reinventing Government*”

yang pada intinya adalah mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik, dimana pemerintah harus mampu berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Selain itu pemerintah harus dapat memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanan, serta dapat menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan, dengan demikian maka sektor usaha swasta dan pemerintah dapat bekerja secara lebih profesional dan efisien.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerataan dan keadilan, maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan yang dihadapi daerah melalui pengembangan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, serta kerjasama strategis antara Pemerintah daerah, Badan usaha milik daerah atau negara, swasta dan masyarakat.

Upaya mendorong terwujudnya kerjasama strategis pemerintah telah mengeluarkan landasan yang cukup kuat bagi pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 195 dan 196 yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah, Badan Usaha Daerah(BUMD),dengan pihak ketiga. Pentingnya kerjasama pemerintah daerah dengan BUMD dan swasta menurut Chang & Rowthord dalam Nining I. Soesilo (2000) adalah karena:

1. Negara/pemerintah bukan paling hebat dalam menaikkan kesejahteraan rakyat;
2. Kegagalan pemerintah lebih serius dari kegagalan swasta;
3. Dari sudut pandang institusional ekonomi;
4. Negara cenderung reaktif bukan proaktif terhadap pasar.

Telah banyak dikembangkan kerjasama baik antar daerah maupun dengan badan usaha daerah (BUMD) serta swasta dan masyarakat. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan pentingnya “Kerjasama Bank Negara Indonesia dengan Pemerintah Kota Makassar dalam Pemanfaatan dan Pengembangan *smart card*. Pengembangan kerjasama khususnya disektor publik pada dasarnya banyak terinspirasi oleh adanya perubahan paradigma administrasi publik sebagaimana disampaikan oleh David Osborne dan Peter Plastrik dalam bukunya *memangkas birokrasi* (1996) yaitu konsep mewirausahakan birokrasi melalui 5 strategi yaitu:

- 1) Strategi Inti yakni menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran, dan arah organisasi;
- 2) Strategi Konsekuensi yakni strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai;
- 3) Strategi pelanggan,yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi pelanggan;
- 4) Strategi Kendali, yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali di dalam organisasi. Kendali dialihkan kepada lapisan organisasi paling bawah, yaitu pelaksanaan atau

masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi, dan misi yang telah ditentukan.

- 5) Strategi Budaya, yakni merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik ini pun berubah(tidak lagi memandang rendah).

David Osborne dan Ted Gaebler dalam *Reinventing Government* (1991) yang antara lain menetapkan 10 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan :

1. Pemerintahan katalis
2. Pemerintahan milik rakyat
3. Pemerintahan yang kompetitif
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi
5. Pemerintah yang berorientasi hasil
6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan
7. Pemerintahan wirausaha
8. Pemerintahan Antisipatif
9. Pemerintahan Desentralisasi
10. Pemerintahan yang berorientasi pasar

Prinsip *reinventing government* tersebut ada beberapa prinsip yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun konsep dan model kerjasama kemitraan strategis antara BUMD, swasta dan masyarakat diantaranya adalah :

1) Pemerintahan katalis

Pemerintah Daerah harus dapat berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan public.

2) Pemerintahan milik rakyat

Pemerintah daerah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanannya, ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat.

3) Pemerintahan yang kompetitif

Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan tersebut, maka sektor usaha swasta dan pemerintah daerah dapat bersaing dan bekerja secara lebih profesional dan efisiensi.

4) Pemerintahan yang digerakkan oleh misi

Pemerintah daerah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrat, hal tersebut dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Konsep Pelaksanaan

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan Wahab dalam

Nuryanti Mustari (2013). Konteks pelaksanaan atau implementasi akan terlihat dampaknya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Inilah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan ditentukan dari pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan memiliki arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak dilaksanakan. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses pelaksanaannya Nuryanti Mustari (2013).

Pelaksanaan kebijakan memiliki cukup luas peluang bagi para aktor yang mengimplementasikan kebijakan. Para pelaksana kebijakan dapat menggunakan sejumlah instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan dengan lancar. Instrumen pelaksanaan terdiri dari dua yaitu, pendekatan perintah kendali dan pendekatan yang menggunakan insentif ekonomi atau pendekatan berbasis pasar. Pelaksanaan kebijakan berdasarkan pendekatan perintah kendali seperti aturan yang bertumpu pada mekanisme birokrasi, melibatkan mekanisme yang agak memaksa. Sedangkan pelaksanaan kebijakan yang menggunakan instrumen pendekatan insentif ekonomi atau pendekatan berbasis pasar lebih lentur, melibatkan penggunaan pajak, subsidi, atau pemberian ganjaran, maupun hukuman lain untuk mendorong agar pihak swasta/individu mematuhi hukum yang berlaku. Pihak yang kontra terhadap pendekatan perintah dan kendali

berpendapat bahwa pendekatan semacam ini mendikte perilaku,memudarkan inisiatif pribadi,serta menya-nyiakan atau menyalahgunakan sumber daya public. Sistem insentif, sebaliknya,dianggap mampu membiarkan setiap individu secara rasional mengambil keputusan sehingga mendorong lahirnya sikap kesukarelaan dan kebebasan memilih,serta meraih tujuan yang diharapkan dengan biaya serendah mungkin bagi masyarakat Solichin Abdul Wahab (2012).

D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko gagal. Hoogwood dan Gunn dalam Nuryanti Mustari (2013) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana,mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama,atau mereka telah bekerjasama secara tidak efisien,bekerja setengah hati atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan,atau permasalahan yang dibuat diluar jangkauan kekuasaan,sehingga betapapun gigih usaha mereka,hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulasi.Akibatnya pelaksanaan yang efektif sukar dipenuhi.

Pelaksanaan yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana,namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan,bencana alam,dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam

mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki Wahab dalam Nuryanti Mustari (2013),

Mazmanian dan Sabatier memandang bahwa suatu kebijakan pelaksanaan selalu berkaitan dengan tiga variable, yakni:

1. Variabel karakteristik masalah, yaitu terdiri dari ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku sasaran kelompok, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Variabel daya dukung peraturan, yang terdiri atas kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pihak luar.
3. Variabel nonperaturan, yang terdiri atas kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Kebijakan pelaksanaan merupakan bagian tugas administrasi Negara yang identik dengan proses politik. Untuk berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan masing-masing tingkatan perlu memahami keadaan yang dapat mendukung keberhasilan proses kebijakan dilaksanakan.

Kebijakan pelaksanaan juga terdapat dua variable yang sangat mempengaruhi terselenggaranya suatu implementasi, yaitu variable sumber daya manusia dan sumber daya modal.

E. Konsep Pendidikan

Kemerdekaan menjanjikan kepada seluruh anak bangsa lintas generasi agar memperoleh pendidikan sesuai dengan UUD 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pasal 28c ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2005). Pendidikan sebagai proses belajar mengajar yang terorganisir dan terus-menerus yang dirancang untuk mengkomunikasikan perpaduan pengetahuan, keahlian, dan pemahaman yang bernilai untuk seluruh aktifitas hidup dalam Mustofa Kamil (2012).

Sistem pendidikan dipandang sebagai perangkat negara yang fungsinya untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kualitas dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan merupakan

usaha untuk mereproduksi klasifikasi sosial dan ekonomi Mustofa Kamil (2012).Ciri-ciri pendidikan dalam Mustofa Kamil (2012) ialah:

- 1.Pendidikan meliputi penyebaran hal yang bermanfaat bagi mereka yang terlibat di dalamnya
- 2.Pendidikan harus melibatkan pengetahuan dan pemahaman serta sejumlah perpektif kognitif
- 3.Pendidikan setidaknya memiliki sejumlah prosedur dengan asumsi bahwa peserta didik belum memiliki pengetahuan dan kesiapan belajar secara sukarela

Pendidikan di sekolah tidak sekedar proses yang berkaitan dengan pengetahuan,tetapi mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan masalah fisik,emosional,dan aspek finansial. Makna pendidikan tentu saja tidak bisa dipahami secara individual maupun psikologi tetapi perlu adanya pemahaman berdasarkan konteks sosial yang lebih luas. Konteks yang dimaksud ialah tidak hanya meliputi institusi pendidikan,institusi pendukung lainnya,maupun lingkungan dimana pendidikan tersebut dilaksanakan,melainkan juga meliputi pertimbangan terhadap posisi hubungan,maupun keterkaitan dalam masyarakat. Dengan demikian,pendidikan memiliki implikasi politik,ekonomi,teknologi,dan sosial,serta harus tetap menjadi konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Konsep *Smart Card*

Pembuat pertama kali teknologi awal *smart card* adalah orang jepang bernama Kinitaka Arimura pada tahun 1970.Dia mematenkan ciptaannya yang

hanya terbatas penggunaannya hanya di Jepang saja dan pembuatannya harus dengan lisensi Arimura.

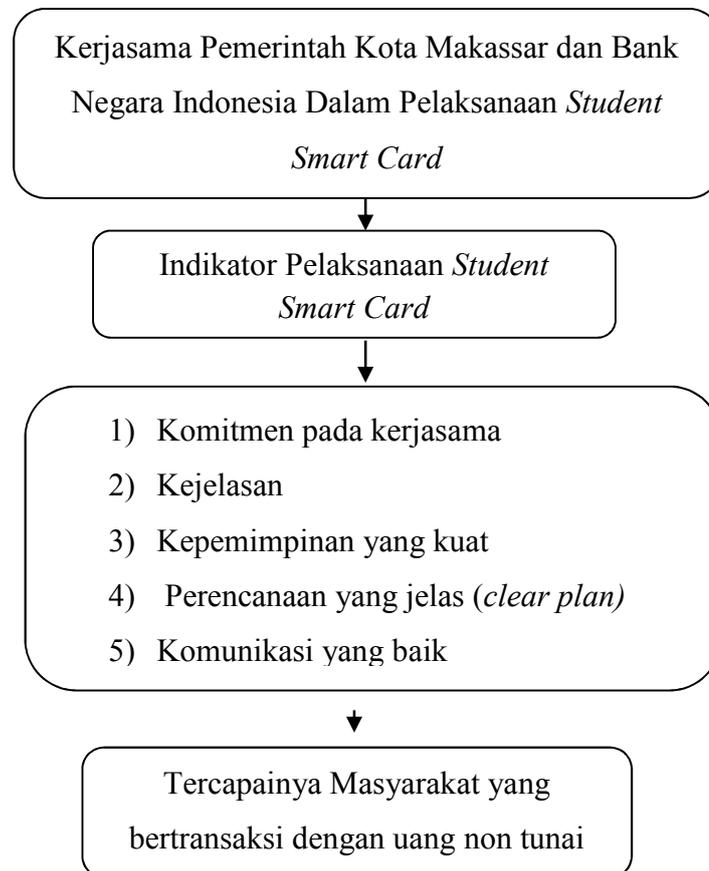
Tahun 1974-1976 Roland Moreno di Perancis membuat hak paten beberapa aspek fungsional *smart card* dan menjual lisensinya ke perusahaan bernama Bull dan perusahaan lain. Lalu Bull mengembangkan aspek microprocessor di *smart card* dan memegang lisensi teknologi yang berhubungan dengan microprocessor *smart card*. *Smart card* sering disebut sebagai *chip card* atau *integrated circuit (IC) card*. Definisi *chip card* sendiri yaitu kategori umum yang mencakup *smart card* dan *memory card*. *Smart card* adalah *plastic card* yang mengandung *memory chip* dan microprocessor. Kartu ini bisa menambah, menghapus, mengubah informasi yang terkandung. Keunggulan *smart card* tidak perlu mengakses database di server karena sudah ada sebagian di kartu. Sedangkan *memory card* dipasang *memory silicon* tanpa *microprocessor*. Fungsi dasar suatu *smart card* adalah untuk mengidentifikasi *card holder* ke sistem komputer. *Cardholder* disini adalah pemilik asli kartu tersebut. Identifikasi ini menyangkut otentifikasi organisasi yang membuat kartu tersebut dan *cardholder* serta hak aksesnya. Dwi Apriyani (2008).

G. Kerangka pikir

Kerjasama Pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card* di kota Makassar merupakan wujud dari upaya untuk memajukan dunia pendidikan. Penggunaan uang non tunai disini juga merupakan sebuah kemajuan tidak hanya untuk jangka pendek yaitu untuk pelajar namun juga untuk jangka panjang untuk masyarakat kota Makassar yang

menggunakan uang non tunai di masa yang akan datang. Pelaksanaan *Student Smart Card* sebagai pembelajaran untuk menggunakan uang tunai dilakukan di lingkungan sekolah karena pelajar akan menjadi bagian dari masyarakat di masa yang datang. Dan itu sudah mulai dilaksanakan saat ini. Indikator kerangka pikir meliputi : (1) Komitmen pada kerjasama, (2).Kejelasan (3) Kepemimpinan yang kuat (4) Perencanaan yang jelas,(5) Komunikasi yang baik.

Bagan Kerangka Pikir



H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir, penjelasan untuk memahami kerangka pikir itu sendiri. Adapun dalam penelitian ini yaitu kerjasama pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam

pelaksanaan *Student Smart Card* di kota Makassar. Dimana fokus penelitian adalah (1) Komitmen pada kerjasama, (2).Kejelasan (3) Kepemimpinan yang kuat (4) Perencanaan yang jelas,(5) Komunikasi yang baik.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

1) Komitmen pada kerjasama

Komitmen pada kerjasama adalah (a). keteguhan dalam bekerjasama,(b).tidak berhenti sebelum tujuan tersebut tercapai,dan (c). Sikap berjuang bersama sampai tujuan tercapai.

2) Kejelasan

Kejelasan terdiri dari (a).Prosedur yang harus dipenuhi oleh pelajar untuk membuat *Student Smart Card*,(b).Kejelasan Fungsinya,(c).Kejelasan Manfaatnya,(d). Kejelasan cara penggunaannya.

3) Kepemimpinan yang kuat

Yakni (a).pengendalian (b).Pengawasan pemerintah atas berlangsungnya *Student Smart Card*.

4) Perencanaan yang jelas (*clear plan*)

Yakni (a).Penetapan Tujuan,(b).Penentuan untuk bagaimana mencapai tujuan.

5) Komunikasi yang baik

Terdiri dari (a).saling memberi informasi dalam perkembangan di dalam kerjasama (b).saling memberi saran dan kritik dalam kerjasama

6) Tercapainya Masyarakat yang bertransaksi dengan uang non tunai untuk segala keperluan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di SMPN 6 Makassar. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan terhitung sejak selesainya seminar proposal dilaksanakan. Alasan memilih tempat tersebut karena ingin mengetahui pelaksanaan *Student Smart Card* di Kota Makassar dimana secara umum, pemerintah kota Makassar masih kurang dalam melakukan sosialisasi sehingga *Student Smart Card* belum dapat dirasakan manfaatnya secara luas.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

Adapun tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk mengkaji dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok. Metode ini selain melakukan wawancara juga disisi lain mengumpulkan data berupa dokumen untuk memahami individu atau kelompok baik dari segi sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku yang bersifat holistik atau keseluruhan.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologis, yaitu suatu bentuk penelitian yang untuk memberikan gambaran umum tentang peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi

tertentu. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir tentang menekankan pada fokus kepada pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.

C. Sumber Data

Sumber data yang utama adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

- 1) Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data primer. Ini dicatat baik melalui catatan tulisan, rekaman audio, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari buku, majalah ilmiah, tesis, ataupun disertasi. Biasanya tersimpan di perpustakaan, buku terbitan pemerintah, ataupun jurnal. Sumber lainnya seperti dokumen pribadi, yaitu tulisan tentang diri sendiri yang ditulisnya sendiri. Dokumen pribadi seperti surat, buku harian, anggaran penerimaan atau pengeluaran diri atau rumah tangga, dan lain-lain.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dimintai keterangan tentang *Student Smart Card*. Orang-orang ini baik sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai orang yang menerapkan kebijakan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memahami orang, kejadian, organisasi, dan pelaksanaan *Student Smart Card* itu sendiri. Wawancara yang dilakukan bersifat informal juga menggunakan jenis wawancara baku terbuka. Diharapkan informasi yang diberikan memiliki manfaat yang diperlukan dalam penelitian ini. Data informan ialah sebagai berikut :

Tabel 1 Data informan penelitian

NO	Jabatan/Staf	Inisial	Nama Lengkap	Keterangan
1.	Kepala Sekolah SMPN 6 Makassar	MN	Munir	1 orang
2.	Staf guru bagian akademik SMPN 6 Makassar	MRD dan AA	Mursyid dan Ahmad Ariandi	2 orang
3.	Pelajar SMPN 6 Makassar	RU,AF,HR,IK	Rahmat Usman,Ahmad Fadli,Haerul,dan Iwan Kurniawan	4 orang
	Jumlah			7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2013) pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian, kecuali penelitian eksploratif, untuk pengujian hipotesa. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara.

- 1) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

- 2) Dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi dokumentasi adalah teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret.
- 3) Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, ataupun observasi selanjutnya diolah menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan jalan menggambarkan secara cermat setiap informasi yang diperoleh. Analisa ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap interaksi atau konsep-konsep yang akan diteliti.

Penelitian ini akan menjawab permasalahan yang berkenaan dengan bagaimana kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card* maka dengan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif.

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui metode wawancara, observasi atau pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat memperjelas data primer. Dalam kaitan ini, peneliti juga melakukan studi dokumen yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi berkaitan kerjasama

pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card*. Dengan demikian dari studi dokumen tersebut diperoleh gambaran jelas mengenai isi dan substansi pelaksanaan program tersebut di Kota Makassar. Sementara itu metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara secara tak berstruktur, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan secara kaku, selain itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses selanjutnya data yang telah terkumpul akan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis. Sehubungan dengan hal tersebut data dan informasi yang telah berhasil diperoleh dan diklasifikasi kemudian dianalisis berdasarkan perspektif kerangka pemikiran yang digunakan. Adapun pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Melakukan observasi seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil penelitian dan studi-studi pustaka yang berkenaan dengan pelaksanaan Inovasi Pemerintah Daerah.
2. Menginterpretasikan gejala dan temuan penelitian, berdasarkan temuan, pengetahuan dan pengalaman.

Selama melakukan analisa, terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan menjadi suatu siklus serta interaksi antara alur yang satu dengan alur yang lainnya yaitu :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, perumusan, atau perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan tertulis di lapangan dimana proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami dan memberikan kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data ini menuntut seorang peneliti untuk mampu mentransformasikan data kasar menjadi bentuk tulisan.

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi kegiatan penelitian yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung, verifikasi ini mungkin sesingkatnya saja. Kemudian pemikiran yang kembali melintas dalam pikiran peneliti selama ini adalah menulis dan meninjau ulang catatan-catatan lapangan, dimana memakan waktu dan tenaga yang lebih besar. Analisis data dilakukan berdasarkan pada pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian yang bersifat deskriptif terhadap data-data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi (pengamatan). Dari keabsahan data yang telah didapatkan tersebut maka dilakukan pemeriksaan dan diverifikasi sesuai dengan keperluan penelitian. Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan triangulasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

G. Pengabsahan Data

1. Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.
2. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.
 - a) Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
 - b) Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c) Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597.

1. Visi dan Misi

- A. Visi dari pemerintah kota Makassar yaitu “Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota Dunia”.
- B. Misi dari pemerintah kota Makassar adalah
 - a) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
 - b) Merestorasi tataruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia
 - c) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan public kelas bebas korupsi

2. Kondisi Strategis Kota Makassar

Kondisi strategis mencakup kondisi lingkungan internal, eksternal, dan organisasi. Kondisi strategis adalah gambaran tentang kota Makassar dari berbagai aspek yang dimana ini berfungsi untuk melihat potensi kota Makassar itu sendiri. Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja pembangunan secara umum dapat dikendalikan secara langsung. Untuk mengoptimalkan kekuatan dan mengalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Kota Makassar adalah:

- a) Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai;
- b) Letak geografis wilayah sangat strategis dan sebagai ibukota provinsi;
- c) Tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang memadai;
- d) Potensi usaha perdagangan dan jasa yang memadai;
- e) Potensi modal transportasi yang memadai;
- f) Suasana politik yang stabil, kearifan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat.

Kelemahan yang masih dimiliki oleh kota Makassar adalah:

- a) Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja belum memadai;
- b) Kebersihan dan keindahan kota belum memadai sebagai tempat hunian yang indah, bersih, dan menarik;
- c) Kualitas sumber daya manusia dibidang industri dan jasa masih rendah;
- d) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mendukung PAD belum memadai;
- e) Struktur ekonomi terutama keterkaitan antar bidang lapangan usahan masih lemah dan rentan terhadap persaingan global;
- f) Pelayanan publik belum maksimal;
- g) Daya saing produk unggulan kota yang masih lemah;

B. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat SMP Negeri 6 Makassar

SMP Negeri 6 Makassar terletak di lokasi yang sangat strategis di jantung kota Makassar tepatnya di jalan Jenderal Ahmad Yani no. 25 Makassar. Sekolah ini merupakan salah satu dari beberapa sekolah unggulan Makassar.

Lima puluh empat tahun silam tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1960 Pemerintah mengeluarkan keputusan pendirian SMP 6 sebagai salah satu sekolah negeri di kotamadya Ujung Pandang dengan SK nomor : 355/SK/BIII. Rajuni merupakan Pejabat sementara kepala sekolah mulai membina sekolah tersebut dengan dibantu 27 orang guru dan 2 staf Tata usaha serta ruang kelas sebanyak 5. Karena lokasi awal SMP negeri 6 terlalu sempit untuk mengembangkan dan melengkapi sarana prasarana sekolah maka, beberapa waktu kemudian Panglima KODAM Hasanuddin Bapak Syaidiman menyerahkan lokasi bekas gedung MAHMILLUB kepada SMP negeri 6 Makassar untuk pengembangan sekolah yang juga beralamat di jalan A. Yani.

Tiga bulan berselang karena Rajuni memasuki masa ocal, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan Husain sebagai kepala sekolah defenitif pertama. Dengan dibantu 30 orang Guru serta 3 orang Pegawai TU, Kepala sekolah mulai membuat SMP 6 menjadi sekolah yang patut diperhitungkan. Bersama dengan BP3 yang saat itu di ketuai oleh Daud Nompo SMP 6 mengukir prestasi demi prestasi, salah satu penghargaan pemerintah atas prestasi yang telah dibuat SMP 6 diumur yang masih belia adalah dengan diberikannya fasilitas kepada Kepala sekolah untuk mengadakan perjalanan studi ke negeri Sakura Jepang untuk mempelajari lebih dekat perkembangan sekolah disana.

Setelah dua tahun Husain menakodai SMP 6 Ujung pandang maka pucuk pimpinan akhirnya diserahkan terimakasih kepada Arifin. Ditangan pimpinan yang baru SMP 6 terus memperlihatkan eksistensinya sebagai sekolah yang patut diperhitungkan, Disamping peningkatan prestasi dibidang akademik dan non

akademik, kedisiplinan serta hubungan ocal kemasyarakatan merupakan 3 prioritas utama misi SMP 6 kala itu.

Geliat SMP 6 Ujung pandang semakin besar ditengah persaingan antar sekolah dalam mengukir prestasi. Sampai akhirnya dengan masa jabatan 2 tahun kepemimpinan diserahkan dari Arifin kepada Robert Paat. Selain Program yang telah dicanangkan pendahulunya untuk memajukan SMP 6 Ujung pandang, Robert Paat berhasil mengkader 3 orang dari 56 orang guru yang ada pada saat itu menjadi kepala sekolah disekolah lain, mereka itu adalah: Ilyas karim, Muh. Basrah Rauf dan Abd. Rasak Karumpa.

Prestasi demi prestasi berhasil diraih SMP 6 bukan hanya tingkat kotamadya dan provinsi tapi tingkat nasional dan beberapa tingkat internasional seperti juara olimpiade dibidang IPA. Seirng dengan berjalannya waktu sekolah ini telah mengalami beberapa pergantian pimpinan dari Robert Paat, Ranreng Pateha, Muin Tarham, Syamsu Alam, Alimuddin Ahmad dan sekarang dibawah pimpinan Hasbi Sebagai wujud Apresiasi pemerintah atas segala presetasi sekolah ini dalam menelorkan siswa-siswa yang beprestasi, SMP 6 telah menerima beberapa predikat baik tingkat propinsi maupun tingkat Nasional.

Pada tahun 2003 SMP 6 makassar oleh pemerintah Pusat ditunjuk Sebagai Pilot Project pelaksana terbatas kurikulum berbasis kompetensi, pada saat yang sama Sekolah ini menerima predikat sebagai Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Koalisi nasional. Tahun 2007 SMP Negeri 6 Makassar ditunjuk sebagai salah satu SMP RSBI, Namun segala bentuk predikat yang telah diraih SMP Negeri 6 Makassar bukanlah hadiah yang didapat begitu saja tapi melalui

beberapa tahap seleksi dan penilaian dari segala aspek. Baik aspek siswa, sarana dan fasilitas, prestasi, juga dari aspek guru.

2. Visi dan Misi

A. Visi

Sekolahku Surgaku Pelopor Peduli Lingkungan

B. Misi

- a) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari
- b) Merekonstruksi semangat kerja untuk mempertahankan predikat sekolah unggulan
- c) Konsisten pada gerakan 3 R menuju sekolah Adiwiyata Mandiri
- d) Merestorasi iklim sekolah menjadi institusi ramah anak
- e) Mewujudkan *Smart School* melampaui Standart Nasional Pendidikan

3. Tujuan Sekolah

- a) Meningkatkan kualitas manajemen sekolah yang memberikan perhatian tinggi terhadap peningkatan pengembangan isi kurikulum.
- b) Meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan, pengiriman guru ke pelatihan yang relevan, bimbingan karier untuk semua warga sekolah, pengakuan terhadap prestasi guru melalui pemberian insentif, kesempatan meningkatkan diri, dan penghargaan *a teacher of the year*.
- c) Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui pendekatan inovasi yang mampu memancing siswa untuk menemukan pandangan-pandangan baru dan memiliki

bahan belajar yang cukup memadai dengan mengoptimalkan perpustakaan untuk pemanfaatan budaya membaca.

- d) Menciptakan suasana sekolah yang kondusif melalui peningkatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan rasa aman bagi seluruh warga sekolah, serta mengoptimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, dengan menggunakan Bahasa Inggris.
- e) Memperoleh prestasi dalam kegiatan olahraga, pramuka, kesenian, dan lomba mata pelajaran baik tingkat kota, provinsi, dan nasional. Serta memperoleh prestasi belajar yang mampu mencapai standar minimal 75 untuk semua pelajara.
- f) Menciptakan persamaan perlakuan pendidikan terhadap semua siswa tanpa membedakan agama, status ekonomi, golongan, suku, jenis kelamin, dan pendidikan bersifat terbuka untuk semua sehingga tercipta rasa keadilan.
- g) Meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua, lembaga-lembaga social, dan semua stakeholders perlu dilakukan untuk menciptakan potensi sekolah dan lingkungan yang bisa tanggap terhadap kebutuhan local, dan bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, termasuk pemberdayaan guru dan komite sekolah.
- h) Mengembangkan penerapan model-model pembelajaran bagi anak berprestasi, bermasalah dan kelompok anak lainnya.

4. Data Siswa, Guru, Staf, Dan Karyawan

Data siswa di SMP Negeri 6 Makassar berdasarkan data administrasi pada tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 1.337 siswa yang terbagi dalam 36 kelas yaitu 12 kelas di kelas VII (Tujuh), 12 kelas di kelas di VIII (Delapan), dan 12 kelas di kelas IX (Sembilan). Berikut ini adalah gambaran tabelnya :

Tabel 2 Data Siswa SMP Negeri 6 Makassar Tahun Ajaran 2017/2018

No.	Kelas	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
1.	VII (Tujuh)	12	450 Siswa
2.	VIII (Delapan)	12	430 Siswa
3.	IX (Sembilan)	12	425 Siswa
4.	Akselerasi	2	32 Siswa

Sumber : *SMP Negeri 6 Makassar Tahun 2017*

Tabel 3 Data Guru, Staf, dan Karyawan SMP Negeri 6 Makassar

No.	Jenis Ketenagaan	PNS	Honor	Jumlah	D3/Lebih Rendah	S1	S2
1.	Guru	48	6	54	-	42	10
2.	Staf Tata Usaha	2	2	4	2	2	-
3.	Pustakawan	2	1	3	1	2	-
4.	Laboran	1	1	2	-	2	-
5.	Keseharan		2	2	-	2	-
6.	Satpam		3	3	3	-	-
7.	Petugas Kebersihan		3	3	3	-	-

Sumber : *SMP Negeri 6 Makassar Tahun 2017*

C. Pelaksanaan *Student Smart Card* di Kota Makassar

Pelaksanaan *Student Smart Card* di kota Makassar sedang berlangsung. Dalam pelaksanaannya, tentu harus dilihat dari beberapa hal agar dapat diketahui apakah program *Student Smart Card* berjalan sesuai rencana atau tidak. Ataukah tepat sasaran atau tidak. Hal tersebut meliputi : 1). Komitmen pada kerjasama, 2). Kejelasan, 3). Kepemimpinan yang kuat, 4). Perencanaan yang jelas, dan 5). Komunikasi yang baik.

1. Komitmen Pada Kerjasama

Komitmen pada kerjasama merupakan hal penting dalam melaksanakan suatu kerja sama dimana komitmen sangat membutuhkan (a).keteguhan dalam bekerjasama,(b).tidak berhenti selama tujuan belum tercapai,dan (c).Sikap berjuang bersama sampai tujuan tercapai. Dengan begitu dapat dikatakan kedua pihak memiliki komitmen dalam bekerjasama.

1.a Keteguhan dalam Bekerjasama

Keteguhan dalam bekerjasama dapat dipahami sebagai sikap menepati janji,menjalankan tugas dengan baik,atau memiliki sikap yang tidak akan berubah.Dengan keteguhan dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dapat menjadikan *Student Smart Card* sebagai kebijakan yang bermanfaat bagi semua orang. Dalam penerapan komitmen pada kerjasama diperlukannya pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasi tugas-tugas,pekerjaan,wewenang,dan dan peran-peran termasuk koordinasi hubungan-hubungan antar bagian secara vertical maupun horizontal dalam suatu struktur organisasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah di SMPN 6 Makassar tentang keteguhan bekerjasama dalam pelaksanaan *Student Smart Card* beliau mengatakan:

”Wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan *Student Smart Card* ini dapat dilihat dari seberapa jauh manfaat *Student Smart Card* itu sendiri.Ada yang dibuat oleh BRI yaitu *Brizzi* dan ada juga yang dibuat oleh BNI yaitu *Tap Cash*. Ini upaya untuk memberikan kemudahan bagi pelajar SMPN 6 Makassar dalam bertransaksi selain itu,juga dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan yang

bersifat baru dan berbasis teknologi”. (Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Keteguhan dalam bekerjasama ditunjukkan oleh pemerintah kota Makassar baik dengan Bank Rakyat Indonesia maupun dengan Bank Negara Indonesia ini untuk memudahkan pelajar kota Makassar dalam penggunaan *Student Smart Card* agar terciptanya masyarakat yang menggunakan uang non tunai. Ini sesuai dengan konsep pengorganisasian yang didalamnya ada proses mengatur dan mengalokasi tugas-tugas seperti *Student Smart Card* yang ditujukan untuk Pelajar yang dalam penyediaanya diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) dan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Pembagian kerja dalam pelaksanaan *Student Smart Card* bertujuan untuk mengurai pekerjaan dalam satuan-satuan tugas yang telah dibagikan sebelumnya sehingga yang bertanggung jawab atas *Student Smart Card* mengerjakan dan bertanggung jawab melaksanakan seperangkat tugas yang terbatas, bukan keseluruhan tugas.

Senada juga dengan hasil wawancara diatas dapat kita lihat dari hasil wawancara peneliti terhadap MRD selaku guru bagian akademik di SMP Negeri 6 Makassar tentang keteguhan bekerjasama dalam pelaksanaan *Student Smart Card* beliau menyatakan:

“Semua siswa itu diberikan *Student Smart Card*. Setiap siswa mendapatkan itu apakah ada siswa yang mengisinya atau tidak kembali lagi kepada orang tua dari siswa itu sendiri. Tapi selama siswa itu sebagai siswa di SMP Negeri 6 Makassar mereka berhak mendapatkan *Student Smart Card*.
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Keteguhan bekerjasama dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dapat diperhatikan dari pembagian *Student Smart Card* terhadap seluruh siswa di SMP Negeri 6 Makassar. Terlepas apakah pelajar itu menggunakannya atau tidak itu

terserah dari orang tua siswa tapi dari pihak pemerintah dan Bank Negara Indonesia (BNI) itu sudah berjalan dan diharapkan sesuai dengan harapan. Pengorganisasian yang baik dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dapat dilihat dari pembagian tugas antara pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara dan Bank Negara Indonesia sebagai penyedia. Selain itu pengorganisasian dalam pelaksanaannya terlihat dimana pembagian *Student Smart Card* itu dibagikan dengan Cuma-Cuma.

Keteguhan bekerjasama dalam pelaksanaan *Student Smart Card* ialah dengan cara membagikannya secara cuma-cuma dan memberikan kebebasan kepada pelajar apakah mau menggunakannya atau tidak. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar tentang keteguhan dalam bekerjasama, dia mengatakan:

“*Student Smart Card* ini lebih sering digunakan sebagai kartu identitas, untuk absen di kelas, untuk pinjam buku di perpustakaan tapi saya jarang mengisinya. Itu karena menggunakan uang tunai masih menjadi kebiasaan. Saya pulang-pergi sekolah naik *Grab* dan itu bayarnya pakai uang tunai. Kalau mau belanja pakai *Student Smart Card* itu hanya di toko-toko besar dan tidak bisa dipakai beli di warung yang lebih kecil”.

(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Keteguhan dalam bekerjasama dalam pelaksanaan *Student Smart Card* diharapkan agar pelajar mau belajar menggunakan uang non tunai dan menumbuhkan sikap hemat bagi pelajar agar dapat menggunakan uang dengan bijak. Caranya dengan melalui pengawasan pengeluaran biaya. Juga pengawasan melalui kehadiran di kelas. Tapi disisi lain bahwa *Student Smart Card* tidak secara gampang bisa menggantikan posisi uang tunai karena pelajar dari segi

kebutuhan itu masih sangat sederhana dan kebutuhan belanjanya cenderung ke warung-warung kecil saja.

Hasil wawancara diatas kurang lebih sama yang diutarakan oleh AF selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan:

“Masih sering pakai uang tunai untuk keperluan sekolah. *Student Smart Card* untuk keperluan sekolah saja seperti kartu identitas. Kalau untuk belanja tiap pagi masih diberikan uang jajan sama orang tua”.
(Hasil wawancara dengan AF 26 Maret 2018)

Student Smart Card sudah berfungsi baik untuk fungsi-fungsi sekolah baik sebagai kartu identitas, untuk mengecek kehadiran pelajar di sekolah tapi untuk sebagai uang non tunai itu belum berjalan dengan baik karena kebutuhan belanja pelajar masih cenderung sederhana dan orang tua pelajar juga bisa saja belum memahami secara betul apa itu *Student Smart Card*.

Melihat dari hasil wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan AA selaku guru akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan:

“Keteguhan dalam pelaksanaan *Student Smart Card* ini untuk memajukan pendidikan itu sendiri terlepas dari keadaan yang ada setidaknya ini sudah memajukan beberapa hal di sekolah ini. Sebagai kartu identitas, bisa melihat kehadiran pelajar di sekolah, bisa digunakan pinjam buku di perpustakaan”.
(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keteguhan dalam bekerjasama sudah memiliki sedikit andil dalam kemajuan pendidikan di SMPN 6 Makassar seperti *Student Smart Card* digunakan sebagai kartu identitas, bisa mengecek kehadiran pelajar di sekolah, dan bisa digunakan untuk meminjam buku di perpustakaan sebagai penunjang ilmu pengetahuan bagi proses belajar-mengajar di kelas. Tapi berbeda dengan fungsinya sebagai uang non tunai, *Student Smart Card* belum berjalan sesuai harapan karena pelajar masih

menggunakan uang tunai untuk keperluannya sehari-hari, juga *Student Smart Card* tidak bisa digunakan untuk belanja di warung yang lebih kecil.

1.b Tidak Berhenti Selama Tujuan Belum Tercapai

Tidak berhenti selama tujuan belum tercapai adalah hal yang mesti dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama pula. Akan sulit kiranya jika dalam sebuah kerjasama hanya satu pihak yang kerja, akan sulit kiranya jika dalam kerjasama tidak ada niat untuk mencapai tujuan bersama-sama. Jika demikian untuk apa kiranya dibuat sebuah kerjasama diantara dua pihak? Maka dari itu pemerintah kota Makassar telah berjuang bersama Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card* baik Pemerintah kota Makassar yang menjalankannya maupun pihak Bank Negara Indonesia sebagai penyedianya demi tujuan bersama. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan MN selaku kepala sekolah di SMP Negeri 6 Makassar yang mengatakan:

”Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dan BNI adalah upaya bersama untuk kemajuan dunia pendidikan. Ini sebuah inovasi selain itu juga berbasis teknologi. Lewat *Student Smart Card* diharapkan agar para pelajar lebih maju dalam hal-hal kebiasaan seperti penggunaan uang non tunai. Lebih modern dari system presentase kehadiran di kelas. Dan lebih maju dari segi cara belanja pelajar itu sendiri”. (Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Banyak cara untuk memajukan dunia pendidikan seperti usaha melaksanakan pendidikan wajib belajar 12 tahun secara berkualitas, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengawasi dan mengevaluasi penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan, serta memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah. *Student Smart Card* ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Makassar. Harapan pemerintah kota Makassar tentu agar

bisa mencapai tujuan menjadikan kota Makassar sebagai kota dunia yang aman bagi semua. Dan ini sudah sangat tepat.

Sejalan dengan wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan MRD selaku guru akademik di SMPN 6 Makassar tentang upaya-upaya yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai dalam pelaksanaan *Student Smart Card* beliau menyatakan :

”Ini wujud komitmen kami terhadap setiap murid yang telah lulus dari sekolah ini. Bahwa *Student Smart Card* itu masih bisa berlaku asal masih diisi kartunya. Paham maksud saya ? bahwa kartu ini masih dapat digunakan membayar tol, belanja di *Indomaret, Alfamart*, tapi sudah dikategorikan sebagai alumni dari SMPN 6 Makassar.

(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Wujud dari usaha tidak berhenti selama tujuan belum tercapai digambarkan melalui wawancara diatas. Bagaimana *Student Smart Card* tetap dapat digunakan meski pelajar telah lulus dan lanjut di sekolah menengah atas atau kejuruan. *Student Smart Card* masih dapat digunakan selama saldonya masih diisi meskipun pelajar itu nantinya telah lulus. Masih dapat digunakan sebagai kartu identitas meskipun datanya nanti dicantumkan bahwa pelajar itu telah menjadi alumni dari SMP Negeri 6 Makassar. Ini upaya agar tujuan dari *Student Smart Card* tercapai dan menjadikan pelajar menjadi bagian masyarakat yang bertransaksi dengan uang non tunai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti melakukan wawancara dengan AF selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“*Student Smart Card* ini jika sudah lulus dari SMPN 6 Makassar masih bisa digunakan sebagai uang non tunai. Ini cukup bagus mengingat kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat ATM cukup dengan *Student Smart Card*

kebutuhan transaksi akan jauh lebih mudah”. (Hasil wawancara dengan AF 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa wujud dari upaya yang dilakukan tidak berhenti sebelum tujuan tercapai dengan aturan yang membuat *Student Smart Card* melebihi waktu seorang pelajar dalam SMPN 6 Makassar. *Student Smart Card* dapat digunakan meskipun telah lulus dari SMPN 6 Makassar kendati telah menggugurkan dari fungsi *Student Smart Card* itu sebagai alat yang digunakan untuk melihat kehadiran pelajar di sekolah, fungsi dan manfaat lainnya masih dapat dirasakan seorang pelajar selama *Student Smart Card* itu masih diisi.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan HR selaku pelajar di SMPN 6 Makassar, dia mengatakan :

“Manfaat yang dirasakan dari *Student Smart Card* ini memudahkan pelajar untuk bertransaksi tentu selaku pelajar ini bisa menjadi pembelajaran dan dengan *Student Smart Card* tetap berlaku setelah lulus nanti, manfaatnya seperti bisa meminjam buku di perpustakaan semoga tetap bisa dijalankan mengingat ini bisa menumbuhkan minat baca pelajar”.

(Hasil wawancara dengan HR 26 Maret 2018)

Upaya yang dilakukan bekerjasama dan tidak berhenti sebelum tercapainya tujuan di tunjukkan dari keseriusan pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dimana ini menjadi kartu layanan pelajar tidak dalam waktu singkat namun dalam waktu yang lama. Kendati tujuan dari *Student Smart Card* untuk menjadikan masyarakat bertransaksi dengan uang tunai namun juga harus tidak menggugurkan manfaat yang lain yang tidak kalah penting yaitu dapat digunakan untuk meminjam buku

di perpustakaan sebagai penunjang proses belajar mengajar di kelas dan meningkatkan minat baca pelajar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan:

“Bagian terpenting *Student Smart Card* adalah untuk membiasakan pelajar dengan menggunakan uang non tunai. Tapi tidak bisa juga dikatakan bahwa ini soal transaksi saja. Ada pembelajaran di dalamnya. Ada pelayanan yang memudahkan pelajar di dalamnya. Ini harus dipahami sebagai upaya memajukan pendidikan”.

(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari *Student Smart Card* adalah untuk menjadikan masyarakat yang bertransaksi dengan uang non tunai. Namun juga memiliki manfaat lain untuk pelayanan pelajar itu sendiri. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dalam proses mencapai tujuan tidak dengan waktu yang singkat. Kemajuan pendidikan penting untuk memajukan bangsa. Pelayanan-pelayanan terhadap pelajar tidak boleh dikesampingkan bahwa pemerintah harus tetap memberikan manfaat-manfaat *Student Smart Card* nantinya setelah pelajar telah naik ke jenjang selanjutnya.

1.c Sikap Berjuang Bersama Sampai Tujuan Tercapai

Sikap berjuang bersama sampai tujuan tercapai merupakan bagian dari adanya komitmen dalam bekerjasama. Sikap berjuang bersama dapat diartikan adanya pembagian tugas dan pembagian tanggung jawab dalam usaha proses pencapaian tujuan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Bentuk dari sikap berjuang bersama sampai tujuan tercapai seperti adanya pembagian tugas. Pemerintah kota Makssar sebagai penyelenggara

kebijakan, Bank Negara Indonesia sebagai penyedia *Student Smart Card*, dan pihak sekolah sebagai yang melaksanakan kebijakan".
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami adanya pembagian tugas di dalam kerjasama yang memungkinkan proses pencapaian tujuan jauh lebih mudah. Peneliti juga telah melakukan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

"Pembagian tugas jelas ada. Itu alasan kenapa adanya sebuah kerjasama. Dengan adanya sikap berjuang bersama, semua pihak akan merasa bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan *Student Smart Card*".
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa dalam sebuah kerjasama diperlukan pembagian tugas dan saling bertanggung jawab pada tugas masing-masing demi upaya pencapaian tujuan secara bersama pula. Dengan seperti ini sebuah kerjasama akan berjalan baik. Bukan soal kemampuan satu pihak saja tapi dari berbagai pihak yang menginginkan keberhasilan pencapaian tujuan secara bersama-sama.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

"Sikap berjuang bersama sampai tujuan tercapai diusahakan berjalan dengan baik. Tugas pihak sekolah memastikan bahwa setiap pelajar memiliki *Student Smart Card*, memastikan bahwa *Student Smart Card* berdampak baik bagi proses belajar mengajar di sekolah". (Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tugas dari pihak sekolah memastikan agar semua pelajar memiliki *Student Smart Card* serta berusaha agar *Student Smart Card* dapat memiliki manfaat bagi proses belajar mengajar di sekolah.

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Apa yang diusahakan oleh pihak sekolah adalah wujud dari upaya kemajuan pendidikan khususnya di SMPN 6 Makassar ini. Pihak sekolah melakukannya dengan baik”.

(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pihak sekolah turut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan *Student Smart Card* apa yang menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam pelaksanaan *Student Smart Card* sudah dijalankan dengan baik dan benar.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan AF selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Sudah menjadi kewajiban pihak sekolah dalam mengawal pelaksanaan *Student Smart Card*. Pihak sekolah melakukannya dengan baik seperti salah satu contohnya untuk membuat *Student Smart Card* tersebut pihak sekolah yang mengurusnya”.

(Hasil wawancara dengan AF 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap berjuang bersama sampai tujuan tercapai sudah berjalan dengan baik. Pemerintah kota Makassar sebagai penyelenggara kebijakan, bank negara Indonesia sebagai penyedia *Student Smart Card*, dan pihak sekolah sebagai pelaksana kebijakan. Dengan komitmen dalam bekerjasama proses pencapaian tujuan akan jauh lebih mudah.

2. Kejelasan

Kejelasan merupakan keadaan atau situasi yang jelas dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dimana baik jika dilihat dari konteks (a).prosedur yang harus dipenuhi oleh para pelajar untuk membuat *Student Smart Card*,(b).kejelasan

fungsinya,(c).kejelasan manfaatnya dan (d).kejelasan cara penggunaannya. Kejelasan juga dapat dipahami sebagai suatu hal yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya,mudah dipahami baik yang menciptakan kebijakan maupun yang menjalankannya Kejelasan sangat penting dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan karena jika tidak tentu saja akan terjadi persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat selain itu dalam pelaksanaannya membingungkan banyak orang. Kejelasan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dengan adanya sebuah kejelasan tentu akan ada standar yang harus dipenuhi sebagai indikator bahwa sebuah kebijakan berjalan baik atau tidak.

2.a Kejelasan Prosedur Yang Harus Dipenuhi Dalam Pembuatan *Student Smart Card*

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan *Student Smart Card* perlu diketahui agar dapat dipahami kejelasannya. Kejelasan prosedur adalah serangkaian hal yang spesifik yang harus dijalani atau dilakukan agar memperoleh hasil yang sama atau keadaan yang sama.

Seperti dikatakan MN selaku kepala sekolah SMPN 6 Makassar tentang kejelasan prosedur. Dia mengatakan :

“Kita kerjasama dengan BRI dan BNI Kalau BNI harus buka tabungan supaya bisa debit dari tabungannya untuk mengisi ulang kartunya.”
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa *Student Smart Card* berbeda cara pembuatannya tergantung di bank mana pelajar tersebut mengajukan. Kalau dari BNI harus buka tabungan baru agar bisa debit dari

tabungannya untuk mengisi ulang kartunya. Kalau BRI tidak perlu artinya bisa dari buku tabungan yang lama untuk mengisi ulang kartunya.

Sama dengan hasil wawancara peneliti dengan RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Kalau saya pribadi itu lewat BNI (*Student Smart Card*) karena orang tua saya yang mau. Itu karena jika membuat *Student Smart Card* lewat BNI sudah sekalian kita semacam punya tabungan tersendiri.”
(Hasil wawancara dengan RU 26 Marert 2018)

Dari hasil wawancara diatas baik antara BNI maupun BRI memiliki cara berbeda dalam memberikan syarat untuk prosedur pembuatan *Student Smart Card*. Dapat dipahami bahwa untuk mengajukan pembuatan *Student Smart Card* dapat dilihat dari masing-masing individu pelajar itu sendiri. Jika pelajar telah memiliki buku tabungan maka boleh buat *Student Smart Card* dari BRI sebaliknya,jika seorang pelajar belum memiliki buku tabungan maka pengajuannya bisa lewat BNI. Tujuannya sama untuk menjadikan masyarakat gemar bertransaksi dengan non tunai,rajin menabung,dan bijak dalam menggunakan uang.

Begitupun dengan hasil wawancara peneliti dengan IK selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Syaratnya adalah biodata,surat keterangan orang tua bahwa benar orang tua setuju,setelah itu di kumpul ke pihak sekolah nanti sekolah yang urus”
(Hasil wawancara dengan IK 26 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas menunjukkan betapa syarat untuk mengajukan pembuatan *Student Smart Card* sangat mudah lagipula sekolah juga yang bantu untuk mengurusnya. Ini sebagai wujud dari upaya memajukan dunia pendidikan dari segi pembelajaran dengan uang non tunai juga dari segi bentuk-bentuk

manfaat yang dirasakan pelajar dari penggunaan *Student Smart Card* itu sendiri. Pengurusan *Student Smart Card* ini disamping sangat mudah juga tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan MRD selaku guru akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Itu karena bertahap jadi tidak bersamaa jadinya. Kadang kelas ini dulu,nanti kelas itu lagi. Lama yang dibutuhkan itu satu atau dua minggu”
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan *Student Smart Card* antara satu sampai dengan dua minggu ini mengingat bahwa pembuatannya dalam jumlah banyak dan selesainya pun bertahap. Dari hasil wawancara diatas dapatlah dikatakan bahwa prosedur pembuatan *Student Smart Card* juga baik karena hanya melibatkan pihak sekolah dan bukan pelajar.Tidak ada kesulitan berarti dari prosedur pembuatan *Student Smart Card* ini. Peneliti telah melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan:

“Tidak ada kesulitan. Kebijakan ini tidak merugikan pelajar,tidak menyulitkan juga. Orang tua pelajar juga maklum ini bagian dari upaya memajukan dunia pendidikan”.
(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan prosedur pembuatan *Student Smart Card* mudah dimengerti dan dijalankan. Baik dari adanya pilihan antara BRI dan BNI yang disesuaikan dengan keadaan pelajar itu sendiri baik yang sudah memiliki buku tabungan maupun yang tidak memiliki buku tabungan bisa sama-sama mengajukan *Student Smart Card* di BRI ataupun di BNI.

Prosedur pengajuan *Student Smart Card* dengan syarat biodata dan surat persetujuan orang tua juga memudahkan proses pelaksanaan *Student Smart Card* itu sendiri apalagi dengan pihak sekolah yang mengurusnya sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu. Lama pembuatannya juga disini dapat dipahami bahwa pembuatan *Student Smart Card* itu dalam jumlah banyak dan butuh waktu untuk menyelesaikannya secara bertahap.

2.b Kejelasan Fungsi

Kejelasan fungsi dapat diartikan sebagai kegunaan dari *Student Smart Card* dalam menunjang proses belajar mengajar. Sebagai upaya untuk memajukan dunia pendidikan pemerintah kota Makassar dan Bank Negara Indonesia mengharapkan ini sebagai inovasi yang bermanfaat untuk pendidikan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah di SMP Negeri 6 Makassar dia mengatakan:

“*Student Smart Card* adalah kartu siswa SMPN 6 Makassar yang terdiri dari dua kartu yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia. Dari BRI disebut *Brizzi* dan dari BNI disebut *Tap Cash*.”
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Student Smart Card terdiri dari dua Bank yang berbeda yaitu Bank Rakyat Indonesia yang disebut *Brizzi* dan Bank Negara Indonesia yang disebut dengan *Tap Cash*. Dari pihak sekolah memberikan pilihan kepada siswa apakah ingin membuat *Student Smart Card* melalui Bank Rakyat Indonesia atau pun Bank Negara Indonesia.

Pernyataan diatas kurang lebih sesuai dengan pernyataan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar yang mengatakan :

“Sebenarnya ada dua. Untuk pelajar itu dari BRI dan BNI yaitu *Brizzi* dan *Tap Cash* disebut *Student Smart Card*. Ini adalah kartu layanan untuk pelajar dan baru di SMPN 6 Makassar ini mulai diterapkan.”

(Hasil wawancara dengan MRD 26 maret 2018)

Student Smart Card pada dasarnya adalah kartu pelayanan yang diperuntukkan untuk pelajar di kota Makassar. Untuk pelajar yaitu *Brizzi* dari Bank Rakyat Indonesia dan *Tap Cash* dari Bank Negara Indonesia. Kartu ini bertujuan untuk memudahkan penggunaannya dalam berbagai hal sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan AA selaku guru akademik SMP Negeri 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Jadi fungsi dari *Student Smart Card* ini ialah sebagai kartu identitas siswa SMPN 6 Makassar, sebagai alat untuk melihat kehadiran dari siswa SMPN 6 Makassar. Selain itu, juga berfungsi sebagai *e-money* atau uang elektronik yang dapat diisi maksimal sampai satu juta rupiah”.

(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Fungsi dari *Student Smart Card* sebagai kartu identitas siswa SMP Negeri 6 Makassar dapat dipahami bahwa SMP Negeri 6 Makassar telah lebih dulu maju dalam hal inovasi kartu identitas siswa. *Student Smart Card* juga berfungsi untuk melihat kehadiran siswa SMP Negeri 6 Makassar. Cara kerjanya tidak dijelaskan dalam wawancara tersebut tapi dapat dipahami bahwa untuk melihat kehadiran siswa sudah tidak manual lagi seperti sekolah-sekolah pada umumnya. *Student Smart Card* berfungsi sebagai *e-money* dapat diartikan bahwa pemerintah kota Makassar atau pun pihak sekolah SMP Negeri 6 Makassar mendukung program Bank Indonesia yaitu *Less Cash Society* yaitu program penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi. Dengan Penggunaan *e-money* diharapkan transaksi dapat lebih efisien dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai. Penggunaan *Student Smart Card* sebagai uang non tunai yang digunakan oleh

pelajar di SMPN 6 Makassar bertujuan agar transaksi jadi lebih mudah. Perkembangan teknologi menjadikan *Student Smart Card* sebagai sebuah inovasi tidak hanya untuk memajukan pendidikan disisi lain juga untuk memudahkan pelajar bertransaksi.

Senada dengan pernyataan diatas,bahwa *Student Smart Card* memiliki berbagai fungsi bagi pelajar sebagaimana hasil wawancara berikut terhadap HR selaku pelajar di SMPN 6 Makassar yang mengatakan:

“Fungsi *Student Smart Card* adalah dapat menyimpan data pelajar disamping itu juga digunakan sebagai absensi di kelas.
(Hasil wawancara dengan HR 26 Maret 2018)

Fungsi *Student Smart Card* sangat banyak jika dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa *Student Smart Card* dapat menyimpan data pelajar,dapat digunakan untuk mengecek kehadiran pelajar,juga dapat berfungsi sebagai uang elektronik. Dengan fungsi sebagaimana tersebut diatas tentu sangat memudahkan dalam berbagai hal. Ini dapat dikatakan sebagai inovasi yang sangat baik dari pemerintah kota Makassar dalam menciptakan kartu layanan untuk pelajar di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Fungsinya banyak sebagai kartu pelajar,bisa digunakan untuk melihat kehadiran di sekolah,juga bisa sebagai uang elektronik tapi fungsi terbaiknya tentu saja sebagai uang elektronik”
(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Fungsi *Student Smart Card* sangat memberikan warna dalam dunia pendidikan dimana ini adalah suatu kemajuan teknologi mejadikan pendidikan dapat lebih bervariasi tidak hanya soal proses belajar mengajar di kelas lebih dari itu sebagai pembelajaran untuk menggunakan uang non tunai. *Student Smart Card*

harus dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelajar, terutama dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan dalam proses belajar mengajar seperti ; *Student Smart Card* sebagai kartu identitas, untuk melihat kehadiran pelajar di sekolah yang tidak menggunakan buku absen seperti yang dulu lagi.

2.c Kejelasan Manfaat

Kejelasan manfaat adalah apa yang menjadi keuntungan jika menggunakan *Student Smart Card* ini baik dalam menunjang proses belajar mengajar maupun dalam proses transaksi non tunai. Kejelasan manfaat tentu saja diharapkan mampu dipahami dengan baik agar pelajar dapat menggunakannya dengan baik juga.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“*Student Smart Card* dapat digunakan belanja di kantin sekolah, bayar tol, belanja di *Indomart, Alfamart, Alfamidi*, dan pinjam buku di perpustakaan”.
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Manfaat *Student Smart Card* sebagaimana tertulis diatas sangat memungkinkan siswa dari SMP Negeri 6 Makassar untuk tidak menggunakan uang tunai lagi. Namun keadaan di lapangan bahwa kantin di SMP Negeri 6 Makassar belum memiliki mesin EDC (*electronic data capture*) yang cukup sehingga masih ada juga siswa yang belanja di kantin menggunakan uang tunai. Juga Manfaat lainnya seperti bayar tol, belanja di *Indomaret, Alfamart, Alfamidi*, dan pinjam buku di perpustakaan. Sejatinya peminjaman buku perpustakaan dengan *student smart card* sudah cukup baik dimana ini diharapkan agar pelajar lebih mudah untuk meminjam buku dan menumbuhkan minat baca bagi para pelajar itu sendiri.

Pernyataan lainnya yang diperoleh dari HR selaku pelajar SMP Negeri 6 Makassar tentang manfaat *Student Smart Card* ia mengatakan:

“Manfaatnya banyak.bisa digunakan belanja di kantin,belanja di *Indomaret, Alfamart, Alfamidi*,bisa dipakai buat pinjam buku perpustakaan. Tapi kalau saya lebih sering gunakan untuk pinjam buku di perpustakaan”. (Hasil wawancara dengan HR 26 Maret 2018)

Pernyataan diatas menguatkan bahwa manfaat yang paling besar ialah untuk dapat digunakan pinjam buku di perpustakaan.Untuk pelajar memang sangat dibutuhkan akan ilmu pengetahuan dan sampai hari ini sumber ilmu pengetahuan terbesar adalah buku. Hadirnya *Student Smart Card* ini cukup membantu dalam menumbuhkan minat baca para pelajar.

Manfaat lainnya seperti dapat digunakan sebagai alat transaksi sebagai uang non tunai perlu diperhatikan dimana justru inilah yang menjadi tujuan utama. Membiasakan pelajar untuk belanja dengan uang non tunai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas,peneliti telah melakukan wawancara dengan IK selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“*Student Smart Card* sebagai alat transaksi non tunai sejauh ini belum berjalan dengan baik karena beberapa hal baik itu karena masih kurangnya alat penunjang *Student Smart Card* itu sendiri maupun pelajar yang lebih memilih untuk menggunakan uang tunai dengan alasan menghindari antrian saat belanja di kantin”.
(Hasil wawancara dengan IK 26 Maret 2018)

Tidak berjalan baiknya *Student Smart Card* sebagai alat transaki non tunai karena alat penunjangnya masih kurang sehingga sering menimbulkan antrian jika belanja di kantin pada jam istirahat sekolah. Selain itu dari pihak pelajar masih menggunakan uang tunai karena malas antri jika sudah belanja di kantin sekolah jadi untuk kelancaran pelaksanaan student smart card pemerintah harus

menyediakan alat penunjang student smart card demi tercapainya tujuan pelajar yang menggunakan uang non tunai.

Manfaat lain dari *Student Smart Card* adalah bisa digunakan untuk bayar tol. Peneliti telah melakukan wawancara dengan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Ini juga jadi manfaat yang sangat baik dari *Student Smart Card* dimana pelajar yang dijemput orang tuanya menggunakan mobil bisa menggunakan *Student Smart Card* untuk bayar tol. Jadi tidak hanya soal pelayanan dalam sekolah, transaksi non tunai, namun disini lain juga dapat memudahkan pelajar dalam perjalanannya..”

(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Manfaat *Student Smart Card* dapat digunakan untuk membayar tol menjadi sebuah kerancuan dalam pelaksanaan *Student Smart Card* ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 77 ayat 1 diungkapkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Jika *Student Smart Card* dapat digunakan untuk bayar tol tentu saja akan menjadi pertanyaan apakah ini untuk pelajar atau orang tua pelajar. Jika kita melihat bahwa untuk pembayaran tol juga sudah ada kartu tersendiri itu disebut dengan *e-toll*

Manfaat dari *Student Smart Card* perlu perlu dibatasi hanya sebatas urusan pelayanan pendidikan dan transaksi non tunai. Ini sudah digambarkan betapa ada kemungkinan pelajar membawa kendaraan sendiri jika memiliki *Student Smart Card* karena bisa digunakan untuk bayar tol dan itu sangat berbahaya baik untuk dirinya maupun orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AA selaku guru bagian akademik SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Terkait soal itu orang tua pelajar paham betul. Kebanyakan pelajar pulang itu dijemput sama orang tuanya jadi tidak ada yang bawa kendaraan sendiri. Juga pelajar ada yang naik angkutan umum, juga jalan kaki.” (Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan dari segi manfaat *Student Smart Card* yang paling berpengaruh adalah yang bersentuhan langsung dengan proses belajar mengajar seperti dapat digunakan untuk meminjam buku di perpustakaan. Manfaat lainnya belum berjalan dengan baik seperti *Student Smart Card* sebagai alat transaksi non tunai di sekolah disebabkan kurangnya alat penunjang *Student Smart Card* itu sendiri yang pada akhirnya menimbulkan antrian jika ingin belanja di kantin sekolah pada jam istirahat.

Manfaat lainnya seperti bisa digunakan untuk bayar tol. Dari hasil penelitian ini tidaklah terlalu berpengaruh karena kebanyakan pelajar diantar ataupun dijemput oleh orang tuanya, naik angkutan umum, sampai dengan jalan kaki.

2.d Kejelasan Cara Penggunaan

Kejelasan cara penggunaan atau cara pakai *Student Smart Card* perlu dipahami sebagai upaya untuk memahami *Student Smart Card* itu sendiri. Cara penggunaan yang dimaksudkan disini tentang bagaimana penggunaan *Student Smart Card* di berbagai bentuk pelayanan yang ditujukan kepada pelajar. Peneliti telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Cara penggunaan *Student Smart Card* jika ingin digunakan untuk meminjam buku di perpustakaan seperti dilakukan penginputan data. Jadi *Student Smart Card* sisa di tempelkan pada alat penunjangnya setelah itu secara otomatis data-datanya tercatat sebagai orang yang meminjam buku perpustakaan”.
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami inovasi dalam peminjaman buku perpustakaan memudahkan dari segi administrasinya. Jadi tidak perlu lagi dicatat di dalam buku besar nama pelajar, nomor induk pelajar, atau menyimpan kartu pelajar di perpustakaan karena semua sudah ada dalam *Student Smart Card*.

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Cara penggunaannya sangat mudah maka dari itu jika ada tugas sekolah pelajar ramai-ramai ke perpustakaan untuk pinjam buku”
(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Gambaran diatas dapat dipahami sebagai sebuah kabar baik dari *Student Smart Card* ini bahwa pelajar makin sering ke perpustakaan untuk meminjam buku selain itu ada kemungkinan pelajar tidak perlu lagi beli buku karena kemudahan yang ditawarkan *Student Smart Card* membuat pelajar bisa pinjam buku di perpustakaan.

Selanjutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Cara penggunaan *Student Smart Card* dalam transaksi di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Pertama, harus ada saldonya. Jadi pembayaran di pintu tol itu tergantung penggunanya lewat pintu mana. Ada yang biayanya Rp. 5000 ada juga yang biayanya Rp. 3500 kalau arah menuju bandara pintu kedua biayanya sampai Rp. 9000. Dari sini *Student Smart Card* itu tinggal ditempelkan pada alatnya, kemudian struk keluar dan portal jalan tol terbuka”.
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa *Student Smart Card* itu harus cukup saldonya untuk bisa digunakan di jalan tol. Dari sini dapat dipahami bahwa manfaat *Student Smart Card* sudah sangat kompleks jika dilihat dari hanya

sekedar kartu layanan pelajar namun disisi lain juga bisa digunakan untuk bayar di jalan tol.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Cara penggunaan yang paling mudah tentu saja yang bersentuhan dengan proses belajar mengajar. Meminjam buku di perpustakaan tidak perlu mengeluarkan biaya. Hanya ditempelkan pada alatnya, buku sudah bisa dibawa pulang”

(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Penggunaan yang paling mudah adalah yang bersentuhan dengan proses belajar mengajar. Mengingat untuk saat ini pelajar harus lebih giat belajar maka manfaatnya yang bisa digunakan untuk meminjam buku adalah yang paling mudah ataupun sering pelajar gunakan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan HR selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Dari sekian banyak manfaat *Student Smart Card* yang belum pernah saya gunakan adalah untuk bertransaksi di pintu tol. Pertama saya tidak punya mobil. Jadi alasan untuk masuk tol itu tidak ada”.

(Hasil wawancara dengan HR 26 Maret 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kejelasan dari *Student Smart Card* sudah cukup dipahami dengan baik. Kendati manfaat seperti dapat digunakan untuk transaksi di jalan tol tidak semua dapat merasakannya ini dapat dimaklumi.

3. Kepemimpinan Yang Kuat

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan diperoleh melalui dua hal. Pertama, kepemimpinan itu diperoleh dari sifat keturunan dari orang tua dan

yang kedua karena adanya kesempatan untuk menempuh pendidikan, belajar, memegang tanggung jawab di sebuah lingkungan, atau ikut latihan dasar kepemimpinan. Jenis dari gaya kepemimpinan pun ada banyak mulai dari otokratis, militeristik, paternalistic, kharismatik, sampai *laissez faire*. Setiap jenis gaya kepemimpinan berbeda satu sama lainnya. Berhasil tidaknya sebuah kebijakan tergantung bagaimana pemimpin mempengaruhi orang lain. Dalam hal pelaksanaan *Student Smart Card* terdiri dari dua yaitu (a). pengendalian dan (b). pengawasan pemerintah atas berlangsungnya *Student Smart Card* ini sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kebijakan ini.

3.a Pengendalian

Pengendalian adalah proses pemantauan kegiatan operasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan tujuan organisasional yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MN selaku kepala sekolah SMPN 6 Makassar, mengungkapkan bahwa :

“Pengendalian yang dapat pemerintah lakukan adalah seperti memberikan arahan kepada pihak sekolah tentang edukasi fungsi dan manfaat *Student Smart Card* disisi lain juga terus mengupayakan alat penunjang *Student Smart Card* itu sendiri”.

(Hasil Wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Pengendalian yang dilakukan sebagaimana tertulis diatas dapat diartikan bahwa sudah cukup baik apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam upaya menjaga agar pelaksanaan *Student Smart Card* dapat berjalan tanpa kendala. Ini juga dapat dipahami bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan perlu kepemimpinan yang kuat agar kebijakan yang diciptakan tidak menjadi kebijakan

sampah. Tanggung Jawab pemerintah kota Makassar dalam pelaksanaan *Student Smart Card* juga tercermin dari hasil wawancara penulis dengan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

”Pengendalian yang pihak sekolah dalam hal ini kehadiran siswa. Kita punya alat. Alat itu yang bekerja mengawasi berapa presentase kehadiran siswa di sekolah. kami juga memiliki alat yaitu mesin EDC (*electronic data capture*) di kantin sekolah dalam menjalankan *Student Smart Card* cuma belum banyak belum bisa memenuhi banyaknya siswa yang belanja di kantin sekolah makanya masih ada juga yang belanja pakai uang tunai.
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Pengendalian yang dilakukan oleh pihak sekolah dapat dilihat dari apakah pelajar tersebut masuk sekolah atau tidak. Disisi lain juga dari segi transaksi pihak sekolah berusaha untuk mengendalikan pelajar melalui pengadaan mesin EDC. Mesin tersebut bertujuan untuk membantu pelajar agar terbiasa menggunakan uang non tunai. Sekalipun belum berjalan dengan baik karena mesinnya masih kurang ini juga bisa disebut upaya untuk melaksanakan *Student Smart Card* dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Pelaksanaan *Student Smart Card* sudah berjalan baik pengendalian yang dilakukan selama ini hanya masalah-masalah teknis saja terkait fungsi maupun manfaatnya.”
(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Pengendalian yang dilakukan sudah berjalan dengan baik disini peneliti berasumsi bahwa tidak ada pelajar yang tidak mengerti tentang *Student Smart Card*. Pengendalian yang dilakukan terutama untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dan hasil yang hendak dicapai sudah sesuai dengan yang

ditetapkan . Jika ada yang tidak sesuai maka perlu untuk mengambil tindakan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Untuk mengambil tindakan dalam pengawasan tentu saja harus dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan pihak pemerintah. Selama dua tahun berlalunya program ini belum ada sekalipun kendala yang dihadapi kecuali hal-hal yang memang yang perlu kita penuhi tapi masih harus pelan-pelan. Seperti mesin EDC itu.”

(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Umumnya pengendalian dilakukan secara menyeluruh oleh pelaksana suatu kebijakan termasuk mengambil tindakan perbaikan atas penyimpangan atau penyelewengan. Tetapi adakalanya sebagian dari kegiatan pengendalian seperti menetapkan standar, memonitor, menilai pelaksanaan kerja, dan membandingkan hasil aktual dengan standar yang sudah ditetapkan, diserahkan kepada individu atau institusi tertentu. Jika terjadi penyimpangan itu dilaporkan kepada manajer yang memberi otoritas kepada mereka untuk melakukan pengendalian. Kemudian manajer yang memiliki otoritas melakukan perbaikan. Dalam hal ini pihak sekolah sudah tepat dalam melaksanakan tugas pengendalian. Menurut RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia Mengatakan :

”Pengendalian yang dilakukan sudah baik karena untuk memahami pelajar itu tidak mudah. Jadi sering ada edukasi terkait fungsi dan manfaat *Student Smart Card*”.

(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Sesuai hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian yang dilakukan sudah berjalan baik. Baik dari pemerintah kota Makassar maupun yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara sering memberikan edukasi kepada

pelajar tentang fungsi dan manfaat *Student Smart Card* . selain itu pengendalian yang dilakukan hanya sebatas teknis saja dapat dipahami bahwa pelajar sudah paham akan *Student Smart Card* itu sendiri.

3.b Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan oleh penyelenggara suatu kebijakan maupun yang berwenang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengawasan . Peneliti telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Dengan *student smart card* ini pelajar akan merasa lebih diawasi karena riwayat belanjanya dapat diketahui oleh orang tua murid masing-masing. Ini juga membuat pelajar bisa lebih hemat dan belanja seperlunya saja”.
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Pengawasan yang dilakukan jika dilihat dari hasil wawancara diatas adalah pengawasan yang lebih tertuju kepada riwayat belanja pelajar itu sendiri. Ini penting agar pelajar mampu untk membiasakan diri untuk berhemat dan lebih menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MRD selaku guru bagian akademik SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Kalau dalam bentuk pengawasan kita bisa mendata seperti anak ini lewat tol tadi pagi jam sekian,menit sekian,dan detik sekian. Juga kita ketahui tadi anak ini belanja di *Indomaret* mana,berapa pengeluarannya”.
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Pengawasan yang dilakukan juga selain dari riwayat belanja pelajar,juga riwayat transaksi lainnya seperti transaksi di jalan tol. Ini bagus agar menghindari pelajar mengemudi sendirian. Pengawasan pelajar di tempat mana juga biasa

belanja merupakan suatu yang sangat maju. Tidak lagi berbertindak semaunya tapi lebih kepada pembelajaran agar menggunakan *Student Smart Card* secara bijak.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Dalam pengawasan yang dilakukan selama ini pelajar sudah menggunakan *Student Smart Card* dengan baik. Ini dilihat dari dari transaksi yang mereka lakukan juga disisi lain pelajar lebih sering menggunakan *Student Smart Card* untuk keperluan meminjam buku di perpustakaan.”

(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Pelajar sudah menggunakan *Student Smart Card* dengan baik dan benar dari transaksi yang mereka lakukan itu tidak berlebihan juga pelajar lebih sering menggunakan *Student Smart Card* untuk meminjam buku di perpustakaan. Dapat diartikan bahwa minat baca pelajar juga sudah tumbuh dari pelaksanaan student smart card itu sendiri.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan:

“*Student Smart Card* lebih sering digunakan untuk keperluan sekolah saja seperti pinajm buku di perpustakaan. Kalau transaksi non tunai hanya sekali-sekali saja.”

(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Penggunaan *Student Smart Card* lebih sering digunakan unrtuk keperluan sekolah saja. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat dipahami untuk menjadikan pelajar yang bertransaksi dengan uang non tunai masih perlu waktu untuk membiasakan mereka. Dengan cara penggunaannya juga mampu untuk memberikan manfaat pada proses belajar-mengajar akan lebih mendekatkan pelajar pada kemajuan yang pada akhirnya juga akan bersentuhan dengan soal transaksi non tunai.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian di SMPN

6 Makassar. Dia mengatakan :

“*Student Smart Card* itu dibagikan kepada tiap-tiap pelajar di SMPN 6 Makassar dari pengawasan kita selama ini semua menggunakannya tapi tidak semua menggunakannya untuk keperluan transaksi. Hanya untuk kepentingan sekolah seperti meminjam buku di perpustakaan”.

(Hasil wawancara AA 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait pengawasan yang dilakukan dalam pengawasan *Student Smart Card* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan selama ini sudah berjalan baik. Pengawasan yang dilakukan berupa riwayat transaksi pelajar, dimana pelajar itu bertransaksi, dan lewat transaksi di tol. Pengawasan yang dilakukan selama ini memandang bahwa pelajar lebih sering untuk menggunakan *Student Smart Card* untuk keperluan sekolah.

4. Perencanaan Yang Jelas

Perencanaan adalah proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi penting ketika hendak mencapai suatu tujuan. Manfaat dari perencanaan yang jelas seperti dapat menentukan arah, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan koordinasi, menentukan standar untuk control, dan memperbaiki manajemen waktu. Dalam pelaksanaan *Student Smart Card* ini perencanaan yang jelas ditentukan dari dua hal yaitu (a).penetapan tujuan dan (b).penentuan untuk bagaimana mencapai tujuan tersebut.

4.b Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan adalah awal sebuah kebijakan tentang apa yang hendak dicapai jika melaksanakan suatu kebijakan tertentu. Penetapan tujuan bisa saja

seperti harapan dimasa depan akan sebuah kemajuan. Penetapan tujuan menjadi penting ketika penentuan kebijakan menjadi dasar untuk menentukan arah atau mengurangi ketidakpastian.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Rencananya tentu saja agar siswa lebih disiplin lagi dalam hal pengeluaran uang untuk keperluan sekolah dengan berbagai pengawasan yang telah saya sebutkan tadi selain itu kami juga ingin mendukung program Bank Indonesia yaitu *Less Cash Society* yaitu membiasakan masyarakat belanja dengan uang non tunai. Dan itu dimulai dari pelajar terlebih dahulu. Dengan penggunaan uang tunai ini siswa tidak perlu lagi membawa uang *cash*, akan lebih mudah jika menggunakan *Student Smart Card* ini.”

(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tujuan besar dari *Student Smart Card* agar masyarakat terbiasa untuk menggunakan uang non tunai. Pelajar dimasa yang akan datang akan menjadi bagian dari kemajuan peradaban itu sendiri dan itu dimulai sejak saat ini. Penggunaan uang non tunai agar masyarakat lebih mudah bertransaksi lagi disisi lain juga harus tetap mengutamakan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan diluar transaksi non tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MRD selaku guru bagian akademik SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Sejak awal pelaksanaan *Student Smart Card* ini rencananya untuk membiasakan pelajar menggunakan uang non tunai. Tapi bukan berarti mengabaikan pelayanan di dalam proses belajar mengajar. Kita tetap berusaha tidak hanya untuk transaksi non tunai tapi memajukan dunia pendidikan juga.”

(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas adalah gambaran betapa *Student Smart Card* tidak hanya soal transaksi non tunai tapi juga untuk memajukan dunia pendidikan. Kemajuan pendidikan diharapkan tidak saja soal perbaikan pelayanan tapi tentang

output menjadikan pelajar yang lebih sopan, terpelajar, dan siap bersaing di dunia kerja nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Pelaksanaan *Student Smart Card* diharapkan mencapai tujuannya pada tahun-tahun mendatang karena ini adalah sebuah inovasi. Tidak banyak yang menciptakan kebijakan seperti ini. Dengan berhasilnya kebijakan ini tentu akan menjadi pintu kemajuan dunia pendidikan secara lebih luas nantinya.”
(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Berhasil atau tidaknya *Student Smart Card* tentu menjadi penentu bagi kemajuan dunia pendidikan di masa yang akan datang. Tentu ini menjadi sebuah kemajuan yang besar bahwa kemajuan teknologi juga membantu untuk membantu kemajuan pendidikan itu sendiri.

Sejalan dengan itu hasil wawancara dengan AF selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Sepengetahuan saya saat ini *Student Smart Card* baru diterapkan di SMPN 6 Makassar dari rencana awalnya akan diterapkan diseluruh sekolah di Makassar. Ini masih permulaan”.
(Hasil wawancara dengan AF 26 Maret 2018)

Student Smart Card baru diterapkan di SMPN 6 Makassar sebagai sekolah unggulan, kebijakan yang bersifat inovatif ini penting untuk memajukan SMPN 6 itu sendiri. Artinya sekolah lain perlu untuk mencontoh SMPN 6 Makassar yang berupaya memajukan kualitas pendidikan dan diharapkan ke depan semakin banyak sekolah yang mulai menerapkan *Student Smart Card* ini. Penerapan yang baik nantinya tentu akan mempengaruhi pendidikan itu pastinya. Dengan penerapan yang baik pula diharapkan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh pelajar di kota Makassar.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Ini mulai diterapkan sejak 2016 lalu. Dari dulu sampai sekarang penerapannya sudah berjalan dengan baik sisa harus ditambah alat penunjang *Student Smart Card* itu guna pelaksanaan yang lebih baik lagi”.
(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Penerapan *Student Smart Card* dimulai sejak 2016 dalam pelaksanaannya sudah mulai ada kemajuan. Mulai dari pembagian *Student Smart Card* secara gratis, prosedur pembuatan yang mudah, sampai kepada manfaat yang dirasakan dalam penggunaan *Student Smart Card*.

4.b Penentuan Bagaimana Untuk Mencapai Tujuan

Penentuan bagaimana untuk mencapai tujuan lebih kepada strategi yang dilakukan dalam memudahkan *Student Smart Card* ini diterapkan tindakan-tindakan yang dilakukan dapat berupa perbaikan yang diambil jika memang diperlukan ataupun tindakan yang diambil jika memang perlu untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah di SMPN 6 Makassar.

Dia mengatakan :

“Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan *Student Smart Card* pemerintah telah memperhatikannya terlebih dahulu masalah peluang dan hambatan dalam pelaksanaan *Student Smart Card*. Peluangnya seperti di SMPN 6 Makassar ini adalah sekolah yang terletak di tengah kota jadi untuk pengawasan dan pengendaliannya cukup mudah. Kedua. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *Student Smart Card* ini masih kurangnya alat penunjang *Student Smart Card* dalam hal transaksi non tunai di dalam sekolah sehingga masih ada yang belanja pakai uang tunai. Tindakan yang diambil adalah dengan memberikan *Student Smart Card* dengan gratis kepada pelajar setidaknya ini membantu dalam pelayanan dalam proses belajar mengajar dulu”.
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan *Student Smart Card* memiliki peluang dan hambatan dan tindakan yang dilakukan sudah tepat dengan memberikan *Student Smart Card* secara gratis kepada pelajar agar pelaksanaannya tetap berjalan setidaknya untuk pelayanan dalam proses belajar mengajar sambil terus berupaya agar manfaatnya sebagai uang non tunai dapat dirasakan oleh pelajar di secara maksimal.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan MRD selaku guru di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Tindakan yang diambil dalam usaha agar *Student Smart Card* berjalan dengan baik membagikannya secara gratis, memudahkan prosedur pembuatannya,memberikan pilihan kepada pelajar,dan tidak ada unsur paksaan mau memakainya atau tidak”.

(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan sudah tepat jika kita mengingat ini adalah hal baru dalam dunia pendidikan. Butuh proses yang panjang untuk menerapkan secara sempurna *Student Smart Card* ini.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan AF selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Adanya surat persetujuan orang tua sebagai syarat untuk mengajukan *Student Smart Card* adalah tindakan yang tepat bahwa untuk menjalankan *Student Smart Card* ini harus melalui semua pihak termasuk orang tua pelajar”.

(Hasil wawancara dengan AF 26 Maret 2018)

Pelajar sebagai bagian utama dalam pelaksanaan *Student Smart Card* tentu harus meminta persetujuan orang tua sebelum mengajukan pembuatan *Student Smart Card*. Ini adalah tindakan yang tepat mengingat pelajar harus diawasi tidak hanya oleh pihak sekolah namun juga orang tua di rumah.

Selanjutnya peneliti telah melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Tindakan yang diambil untuk bagaimana agar *Student Smart Card* mencapai tujuannya sudah banyak. Pelajar juga sudah bisa merasakan manfaat *Student Smart Card* meskipun belum maksimal”.
(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Penentuan bagaimana untuk mencapai tujuan terlaksananya *Student Smart Card* dengan maksimal sudah diupayakan namun kembali lagi masalah alat penunjang *Student Smart Card* belum memadai disisi lain pelajar juga masih lebih sering menggunakan uang tunai dan menggunakan *Student Smart Card* untuk keperluan proses belajar mengajar saja.

Hasil wawancara peneliti dengan IK selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

”Tindakan yang dilakukan pihak sekolah belum bisa mengubah pelajar untuk menjadikan *Student Smart Card* sebagai uang non tunai disisi lain manfaatnya dalam proses belajar mengajar sangat baik dimana *Student Smart Card* perlahan sudah menumbuhkan minat baca pelajar karena *Student Smart Card* ini dapat digunakan untuk meminjam buku di perpustakaan”.
(Hasil wawancara dengan IK 26 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat menggambarkan penentuan bagaimana untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dibutuhkan kemudahan bagi pelajar agar *Student Smart Card* dapat diterima ditengah-tengah pelajar sebagai sebuah upaya untuk memberikan pembelajaran kepada pelajar itu sendiri agar mulai bisa menggunakan uang non tunai disisi lain juga untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan saat ini tentu saja harus lebih mengedepankan soal pendidikan dulu karena itu yang menjadi prioritas utama untuk saat ini.

5. Komunikasi Yang Baik

Komunikasi adalah pertukaran (penyampaian dan penerimaan) informasi antara pengirim dan penerima sehingga ada saling pengertian karena memiliki makna yang sama tentang pesan yang dikirim dan diterima (a). saling memberikan informasi dalam perkembangan sebuah kerjasama, (b). saling memberikan saran dan kritik dalam proses kerjasama. Untuk memahami komunikasi yang baik dalam pelaksanaan *Student Smart Card*.

5.a Saling Memberikan Informasi Dalam Perkembangan Sebuah Kerjasama

Adanya keterbukaan saling memberikan informasi penting untuk sebuah kemajuan bersama. Dalam pelaksanaan *Student Smart Card* keterbukaan untuk saling memberikan informasi sudah mulai berjalan penulis telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah di SMPN 6 Makassar dia mengatakan :

“Komunikasi yang biasa terjadi terkait pelaksanaan *Student Smart Card* ini ialah hanya dalam proses pembuatan *Student Smart Card* dimana pihak sekolah bertemu dengan pihak BNI setelah jadi pihak dari sekolah ke BNI lagi untuk mengambil *Student Smart Card* selain itu dalam komunikasi antara siswa dan pihak sekolah ialah terkait cara pemakaiannya”.
(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Proses pertukaran informasi yang terjadi dalam perkembangan *Student Smart Card* sejatinya sudah berjalan dengan sangat baik antar pemerintah kota Makassar, Bank Negara Indonesia, dan SMP Negeri 6 Makassar. Dimana SMP Negeri 6 Makassar paham betul dari hasil sosialisasi bahwa *Student Smart Card* bertujuan untuk kemajuan pendidikan itu sendiri. Pertukaran informasi antar sekolah dan pelajar pun dapat terlihat hanya sebatas cara pemakaiannya artinya pihak sekolah harus lebih detail lagi menjelaskan soal cara pemakaiannya.

Saling memberikan saran dan kritik dalam sebuah kerjasama adalah sebuah bentuk adanya keterbukaan saling memahami dan peduli agar kerjasama berjalan dengan baik tanpa hambatan. Pemahaman yang baik tentu akan memudahkan pihak-pihak bekerjasama untuk saling memberikan saran dan kritik. Tentu saja saran dan kritik yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan secara bersama-sama. Penulis telah melakukan wawancara dengan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Komunikasi yang terjalin sudah baik. Dari pihak pemerintah yang mengadakan program ini dan sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya komunikasi yang baik telah berlangsung. Dari pihak sekolah kami menerimanya dengan baik. Sosialisasi yang mereka (Pemerintah Kota Makassar dan Bank Negara Indonesia) lakukan dapat kami pahami sebagai wujud dari upaya kemajuan pendidikan itu sendiri”.
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Komunikasi sudah berjalan baik dimana pihak sekolah selaku pelaksana dari *Student Smart Card* memahami sosialisasi yang telah pemerintah lakukan. Ini bukti adanya keterbukaan dan baiknya dari sebuah komunikasi yang telah terjalin. Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Saling memberikan informasi sudah berjalan baik antara pihak sekolah dan pelajar itu sendiri. Seperti hal-hal teknis bahwa di kantin biasa terjadi antrian panjang kalau belanja menggunakan uang non tunai. Kita jika mendengar sudah seperti itu makanya biasanya menghimbau untuk menggunakan uang tunai saja untuk menghindari penumpukan antrian di kantin”.
(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa adanya pertukaran informasi antara pihak sekolah dan pelajar dimana jika ada kesalahan dalam pelaksanaan *Student Smart Card* maka pelajar akan segera menginformasikan. Ini bukti bahwa telah terjadi komunikasi yang baik antar pihak sekolah dan pelajar.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan RU selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Komunikasi yang terjadi biasanya hanya masalah teknis saja tidak pernah ada kesalahan yang terlalu membuat heboh dalam pelaksanaan *Student Smart Card* tersebut”.

(Hasil wawancara dengan RU 26 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan *Student Smart Card* hanya masalah teknis saja. Artinya diluar daripada itu dapat dikatakan baik-baik saja. Adanya keterbukaan saling memberikan informasi menandakan bahwa setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan *Student Smart Card* menginginkan agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa kesalahan apapun. Ini dapat dimaklumi bahwa untuk mencapai suatu tujuan semuanya harus aktif berperan dalam proses mencapai tujuan itu sendiri.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan HR selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Pertukaran informasi antara pihak sekolah dan orang tua biasa terjadi hanya sebatas pada awal surat persetujuan orang tua sebagai syarat mengajukan *Student Smart Card* .”

(Hasil wawancara dengan HR 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses saling memberikan informasi dalam pelaksanaan *Student Smart Card* sudah berjalan cukup baik. Pertukaran informasi antara pemerintah kota Makassar dan pihak sekolah sudah berjalan dengan baik itu ditandai dari apa yang dipaparkan dalam sosialisasi *Student Smart Card* dapat dipahami dan dijalankan dengan baik. Pertukaran informasi antara pihak sekolah dan pelajar juga berjalan baik dimana dari pihak pelajar ada kesadaran untuk memberikan informasi jika saja alat

penunjang *Student Smart Card* kurang memadai. Juga pertukaran informasi antara pihak sekolah dan orang tua pelajar sudah terjadi dengan cukup baik dimana itu terjadi pada adanya surat persetujuan orang tua yang harus ditandatangani sebagai syarat untuk mengajukan *Student Smart Card*.

5.b Saling Memberikan Saran Dan Kritik Dalam Proses Kerjasama

Proses saling memberikan saran dan kritik dalam suatu kerjasama penting sebagai upaya mencapai tujuan secara bersama-sama. Dengan saling memberikan saran dan kritik akan ada sikap saling terbuka dan memudahkan untuk mencapai tujuan secara terbuka. Penulis telah melakukan wawancara dengan MN selaku kepala sekolah di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Saling memberikan saran dan kritik tentu ada dari pelajar untuk pihak sekolah seperti pelajar mau mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di kantin diperbanyak agar tidak terjadi antrian pembayaran di waktu istirahat. Kita usahakan itu. Contoh lain bahwa pelajar memberikan saran agar proses pembuatannya dipercepat. Itu semua proses memberikan saran dan kritik dalam perkembangan *Student Smart Card* ini”.

(Hasil wawancara dengan MN 26 Maret 2018)

Pemberian saran dan kritik yang dilakukan oleh pelajar adalah bukti bahwa pelajar pun menginginkan agar program ini berjalan dengan baik. Masalah pengadaan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) adalah masalah internal SMP Negeri 6 Makassar tapi diluar itu semua manfaat yang lain sudah sangat membantu pelajar dari setiap urusannya. Pemberian saran dan kritik pelajar kepada pihak sekolah akan meumbuhkan sikap kritis dalam diri pelajar. Ini baik karena tidak hanya pemerintah, bank negara Indonesia, ataupun pihak sekolah yang mengawal jalannya *Student Smart Card* tapi juga pelajar yang menjadi sasaran

kebijakan. Ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan MRD selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Biasa terjadi pemberian saran dan kritik yang dilakukan oleh pelajar ke pihak sekolah. Saran maupun kritik nanti kita bahas dengan pemerintah dan BNI. Dengan saran dan kritik tersebut memacu kami untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan *Student Smart Card*”.
(Hasil wawancara dengan MRD 26 Maret 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa adanya koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan pemerintah dimana setaip kritik dan saran akan dibahas secara bersama-sama. Ini sudah baik sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah sudah seharusnya mengawal jalannya *Student Smart Card* ini. Peneliti telah melakukan wawancara dengan AA selaku guru bagian akademik di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Bentuk pemberian saran dan kritik yang dilakukann oleh pelajar terhadap sekolah biasanya melalui percakapan melalui perwakilan dari pihak pelajar”
(Hasil wawancara dengan AA 26 Maret 2018)

Adanya pertemuan antara pihak sekolah dan pelajar adalah bentuk dari baiknya sebuah komunikasi. Pihak sekolah ingin mendengarkan pelajar yang memberikan saran dan kritik sebagai bentuk melibatkan juga pelajar dalam upaya pelaksanaan *Student Smart Card* yang baik dan benar. Ini sebagaai bukti bahwa dalam upaya memajukan pendidikan harus melibatkan semua pihak.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan HR selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Orang tua pelajar sejauh ini belum ada yang memberikan saran dan kritik karena pelaksanaannya selama ini sudah baik. Artinya jika ada hal ya ng tidak baik tentu saja pelajar akan bicara kepada orang tuanya. Tapi karena ini sudah baik maka tidak ada saran dan kritik dari orang tua pelajar”
(Hasil wawancara dengan HR 26 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bisa saja orang tua pelajar kurang mengetahui apa itu *Student Smart Card* atau pihak sekolah kurang menjelaskann kepada orang tua pelajar tentang apa itu *Student Smart Card* ini juga harus diperhatikan bahwa orang tua pelajar juga mestinya turut dalam mengawal pelaksanaan *Student Smart Card* agar dapat menyadari bahwa saat ini sedang ada upaya untuk memajukan dua pendidikan.

Selanjutnya Peneliti telah melakukan wawancara dengan AF selaku pelajar di SMPN 6 Makassar. Dia mengatakan :

“Hal yang paling sering di kritik tentu saja soal mesin alat penunjang *Student Smart Card* Tersebut”

(Hasil wawancara dengan AF 26 Maret 2018)

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah baik terjalin pemberian saran dan kritik dalam pelaksanaan *Student Smart Card*. Perlu juga melibatkan orang tua dalam mengawal pelaksanaan student smart card dengan begitu semuanya bisa tolong menolong dalam memajukan dunia pendidikan. Pengadaan mesin EDC penting sebagai penunjang *Student Smart Card* sebagai uang non tunai karena jika tidak manfaat yang dirasakan akan tidak maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Student Smart Card* melalui komitmen pada kerjasama terdiri dari:
 - (a). **Keteguhan Dalam Bekerjasama** dengan cara membagikan *Student Smart Card* secara gratis kepada pelajar juga disisi lain memberikan pilihan kepada pelajar apakah ingin mengajukan *Student Smart Card* lewat Bank Negara Indonesia atau Bank Rakyat Indonesia. *Student Smart Card* belum dapat digunakan secara maksimal karena dalam pelaksanaannya baru sekedar sebagai kartu identitas di sekolah,digunakan buat absen di kelas ,dan untuk pinjam buku di perpustakaan. Fungsinya sebagai uang non tunai belum optimal karena pelajar masih cenderung menggunakan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.
 - (b). **Tidak Berhenti Selama Tujuan Belum Tercapai** yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar dimana *Student Smart Card* tetap bisa digunakan setelah pelajar lulus nantinya sebagai uang non tunai. Namun disisi lain belum ada kejelasan apakah fungsinya untuk menunjang proses belajar tetap ada seperti dapat meminjam buku di perpustakaan.
 - (c). **Sikap berjuang bersama sampai tujuan tercapai** sudah berjalan dengan baik. Pemerintah kota Makassar sebagai penyelenggara kebijakan,Bank Negara Indonesia sebagai penyedia *Student Smart Card*,dan pihak sekolah SMPN 6 Makassar sebagai pelaksana kebijakan. Dengan komitmen dalam bekerjasama proses pencapaian tujuan akan jauh lebih mudah
2. Kejelasan meliputi :
 - (a). **Prosedur Yang Harus Dipenuhi Oleh Para Pelajar Untuk Membuat *Student Smart Card*** sudah berjalan dengan baik dimana syarat

yang harus dipenuhi adalah biodata pelajar dan tanda tangan orang tua dalam surat persetujuan pembuatan *Student Smart Card*. Selain itu waktu pembuatan satu sampai dengan dua minggu dan jadinya pun bertahap. Ini bisa dipahami pembuatan *Student Smart Card* dalam jumlah yang banyak. (b). **Kejelasan Fungsi** dari *Student Smart Card* sebagai kartu identitas, untuk menyimpan data pelajar, sebagai alat untuk absen di kelas, dan sebagai uang non tunai. Perkembangan teknologi menjadikan *Student Smart Card* sebagai sebuah inovasi tidak hanya untuk memajukan pendidikan disisi lain juga untuk memudahkan pelajar bertransaksi. (c). **Kejelasan Manfaat** terdiri dari *Student Smart Card* dapat digunakan belanja di kantin sekolah, bayar tol, belanja di *Indomart*, *Alfamart*, *Alfamidi*, dan pinjam buku di perpustakaan. Namun manfaat yang paling dirasakan adalah yang bersentuhan langsung dengan proses belajar mengajar seperti dapat digunakan untuk pinjam buku di perpustakaan. (d). **Kejelasan cara penggunaan** *Student Smart Card* sudah cukup dipahami dengan baik kendati manfaat seperti dapat digunakan transaksi di jalan tol tidak semua dapat merasakannya ini dapat dipahami karena tidak semua pelajar di SMPN 6 Makassar memiliki mobil.

3. **Kepemimpinan yang kuat** terdiri dari (a). **Pengendalian** dalam pelaksanaan *Student Smart Card* seperti adanya edukasi tentang manfaat dan fungsi *Student Smart Card*, pengendalian dalam pelaksanaan proses belajar mengajar seperti melihat presentase kehadiran pelajar di sekolah. Pengawasan yang dilakukan sudah baik kecuali hal-hal yang memang harus dipenuhi yang masih dalam tahap perbaikan. (b). **Pengawasan** dalam pelaksanaan *Student Smart Card* berupa

pengawasan melalui riwayat belanja pelajar, riwayat transaksi di jalan tol, dan dalam peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Keutamaan dari *Student Smart Card* ini sebagai uang non tunai namun justru lebih sering digunakan untuk keperluan proses belajar mengajar.

4. Perencanaan Yang Jelas terdiri dari (a). **Penetapan Tujuan.** Penetapan tujuan yang dimaksud adalah agar masyarakat terbiasa untuk menggunakan uang non tunai. Pelajar dimasa yang akan datang akan menjadi bagian dari kemajuan peradaban itu sendiri dan itu dimulai dari pembelajaran saat ini. Namun disisi lain juga harus tetap mengutamakan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan diluar transaksi non tunai. (b). **Penentuan Bagaimana Untuk Mencapai Tujuan** dalam pelaksanaan *Student Smart Card* dilakukan dengan analisis peluang dan hambatan secara teliti, serta memberikan kemudahan baik dari prosedur pembuatan maupun penggunaannya dari *Student Smart Card*. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala soal terbatasnya mesin penunjang *Student Smart Card* sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal.

5. Komunikasi Yang Baik terdiri dari (a). **Saling Memberikan Informasi Dalam Perkembangan Sebuah Kerjasama** seperti pertukaran informasi antar pemerintah dan pihak sekolah, antar pelajar dengan pihak sekolah, atau pun antar sekolah dengan orang tua pelajar dalam hal ini melalui surat persetujuan sebelum pengajuan *Student Smart Card*. proses saling memberikan informasi dalam pelaksanaan *Student Smart Card* sudah berjalan cukup baik. Pertukaran informasi antara pemerintah kota Makassar dan pihak sekolah sudah berjalan dengan baik itu ditandai dari apa yang dipaparkan dalam sosialisasi *Student Smart Card* dapat

dipahami dan dijalankan dengan baik. Pertukaran informasi antara pihak sekolah dan pelajar juga berjalan baik dimana dari pihak pelajar ada kesadaran untuk memberikan informasi jika saja alat penunjang *Student Smart Card* kurang memadai. Juga pertukaran informasi antara pihak sekolah dan orang tua pelajar sudah terjadi dengan cukup baik dimana itu terjadi pada adanya surat persetujuan orang tua yang harus ditandatangani sebagai syarat untuk mengajukan *Student Smart Card*. (b). **Saling Memberikan Saran Dan Kritik Dalam Proses Kerjasama** seperti adanya kritik oleh pelajar untuk sekolah. Pengadaan mesin EDC menjadi penting ketika ingin agar *Student Smart Card* ini dapat berfungsi secara maksimal.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah harus memberikan pengadaan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di sekolah agar penerapan *Student Smart Card* sebagai uang non tunai dapat berjalan sesuai rencana.
2. Hendaknya pemerataan penerapan *Student Smart Card* tidak hanya di SMPN 6 Makassar tapi juga di sekolah-sekolah lain di Makassar.
3. Kiranya manfaat *Student Smart Card* yang bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol perlu dikaji ulang
4. Harus dikembangkan pada tahun-tahun selanjutnya agar kebijakan ini tetap berjalan
5. Diharapkan Sosialisasi lebih sering lagi dilakukan agar dapat dikenal secara luas
6. Hendaknya komunikasi terjalin lebih baik lagi antara pihak sekolah dan orang tua pelajar

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Dwi. 2008. *Digital Signature Menggunakan Sim Card*. Malang: Karya Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Asniawati, Besse. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility CSR*. PT Pupuk Kaltim, Program Pascasarjana UNHAS Makassar
- Ditjen P2M dan PL.2004.*Pelatihan Manajemen P2L &PL*. Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan berbasis Institusi.Depkes RI.
- Madani, Muhlis, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Makassar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Moleong, Lexy.2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Notoadmodjo, Soeidjo.2007.*Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted.1991. *Mewirauahakan Birokrasi*. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Peter, Plastrik dan Osborne, David. 1996.*Memangkas Birokrasi*, PPM. Jakarta
- Soesilo, Nining L.2000. *Reformasi Pembangunan dengan Langkah-Langkah Manajemen Stratejik*. Jakarta. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, FE. UI/
- Sudaryono.2014. *Konsep Smart City untuk Kota-Kota di Indonesia* .Magister Pencanaan Kota dan Daerah UGM.
- Tahir, Muhlus, M dan Harakan, Ahmad. *Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar*. Makassar. Karya Ilmiah Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mustari, Nuryanti. *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar. Membumi Publishing.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Kamil, Mustofa, 2012.*Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung.

Alfabeta.

Siagian,Sondang,P.2015.*Teori dan Praktek Kepemimpinan*.Jakarta.

PT. Rineka Cipta

Wahab,Solichin,Abdul.2012.*Analisis Kebijakan Publik*.Malang.

PT. Bumi Aksara

Silalahi,Ulber,2011.*Asas-Asas Manajemen*.Bandung.

PT.Refika Aditama.

Thoha,Miftah.2011.*Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.Jakarta.

Prenademedi Group.

Achmad,Mansyur.2010.*Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik*.Yogyakarta.

Rangkang Education.

Uhbiyati,Nur dan Ahmadi,Abu.2015.*Ilmu Pendidikan*.Jakarta.

PT. Rineka Cipta.

Mulyasa.2015. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*.Jakarta

PT. Bumi Aksara

Kompasiana. 2014. *Prime Access Card, Smart Card for Smart City*. (http://www.kompasiana.com/widyatharjono/prime-access-card-smart-card-for-smart-city_54f35f457455137c2b6c738f) diakses pada 3 february 2017

FlazzIndo.2008. Sejarah Smart Card, (<http://smart-card-flazz-indo.blogspot.co.id/2008/2011/sejarah-smart-card>) diakses pada 3 Februari 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 dan 196

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Pasal 77 Ayat 1

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Fajar AR, panggilan Fajar lahir di Makassar pada Tanggal 17 September 1995 dari pasangan suami istri Bapak Alwi Rajab dan Ibu Alwyah, peneliti adalah anak kedua dari Enam bersaudara peneliti sekarang bertempat di Jl. Perintis kemerdekaan KM 17 Kecamatan Pai Kota Makassar. Pendidikan formal penulis dimulai dari Pesantren Modern Ulul-Albab

pada Tahun 2001 dan lulus tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 16 Makassar, Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan dan tamat pada tahun 2010, pada Tahun 2010 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 22 Makassar, Sulawesi selatan mengambil jurusan IPA dan Tamat tahun 2013, dan di tahun 2013 penulis melanjutkan studi dan Alhamdulillah di terima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menyelesaikan studi pada tahun 2018 program (S1).



